

**PRAKTIK *BLACK MARKET* PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA CUKAI MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ARIZKA NOVANDITA HARDIANTI
NIM. 135030400111039**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2017

MOTTO

**“ORANG-ORANG HEBAT DI BIDANG APAPUN BUKAN BARU
BEKERJA KARENA MEREKA TERINSPIRASI, NAMUN MEREKA
MENJADI TERINSPIRASI KARENA MEREKA LEBIH SUKA BEKERJA.
MEREKA TIDAK MENYIA-NYIAKAN WAKTU UNTUK MENUNGGU
INSPIRASI”**

(Ernest Newman)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku untuk

Ayahku, Bapak Suhartono

Ibuku, Ibu Kusbandiyah

Kakakku, Andhito Rizqi Hardiansyah

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Prakti *Black Market* Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan
Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang.

Disusun oleh : Arizka Novandita Hardianti

NIM : 135030400111039

Fakultas : Ilmu Administrasi

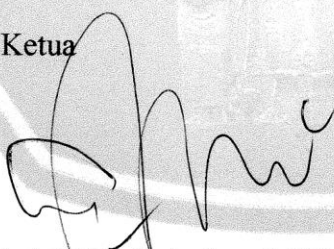
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 22 Agustus 2017

Komisi Pembimbing

Ketua


Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak
NIK. 2013048703162001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Oktober 2017
Jam : 12.00
Skripsi atas nama : Arizka Novandita Hardianti
Judul : Praktik *Black Market* Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang.


dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI


Ketua


Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak
NIK. 2013048703162001

Anggota


Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota


Rizki Yudhi. D, S.Sos.MPA
NIP. 19770502 200212 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 05 September 2017

Mahasiswa,



Arizka Novandita Hardianti
NIM. 135030400111039

RINGKASAN

Arizka Novandita Hardianti, 2017 , **Praktik *Black Market* Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang**, Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak, 137 hal + xiii

Penelitian tentang Praktik *Black Market* Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya praktik *Black Market* di Kota Malang. Tujuan lainnya yakni untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi pelaksanaan impor barang secara ilegal dan mengetahui dampak-dampak yang terjadi pada pemerintah dan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah Praktik *Black Market* Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang dan dampak praktik *Black Market* terhadap Pemerintah dan Masyarakat. Lokasi penelitian bertempat di Kota Malang dengan situs penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang sebagai instansi yang berwenang mengelola masuk dan keluarnya barang-barang impor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik *Black Market* Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang telah beredar sangat pesat terbukti dengan adanya beberapa pelaku yang telah lama menjalankan bisnis ilegal ini. Kegiatan *Black Market* ini didasari karena adanya faktor pendukung antara lain dari segi masyarakat, gaya hidup masyarakat meningkat mengakibatkannya permintaan barang-barang *branded* meningkat akan tetapi masyarakat cenderung lebih memilih membeli barang dengan harga murah (barang impor ilegal). Kemudian faktor kedua yaitu kurangnya adanya peraturan yang tegas mengenai importir yang melakukan impor barang secara ilegal. Pada praktik yang telah terjadi pada Kantor Pos lalu Bea Malang, pelaku importir barang ilegal oleh petugas hanya dikenakan sanksi pembayaran sesuai dengan prosedur apabila tidak dapat melunasinya barang tersebut hanya ditegah tidak boleh keluar dari Kantor Pos Lalu Bea Malang. Oleh karena itu terdapat Dampak dilihat dari sisi Pemerintah yaitu berkurangnya pemasukan Negara dibidang Impor dan pada masyarakat akan berdampak menurunnya kedisiplinan dari masing-masing individu akan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kata Kunci: *Black Market*, Impor, Praktik *Black Market*, Pajak Dalam Rangka Impor.

SUMMARY

*Arizka Novandita Hardianti, 2017, **Black market on Customs Type Madya Malang**, Astri Warih Anjarwati, SE, MSA, Ak, 137 pages + xii*

Research about Black Market on Customs Type Madya Malang is to find out more how Black Market was happen in Malang City. Other purpose of this research is for know what the main factor and any kind of other reason for some people import the goods on illegal track and know about the impact for Government and other people.

Type of research that used by researcher is qualitative research with descriptive approaches. This research is focused to Black Market on Customs Type Madya Malang and the impact for Government and other people. Research is located in Malang City with the research site is Customs Type Madya Malang as an agency authorized by Government to organized import and export goods. Technic to collect data is interview and documentation.

Result from this research is showing how Black Market on Customs Type Madya Malang is outstanding so fast evidently there was any subject who has been long time in this illegal business. Black Market is based from any kind of supporting factor like from people, a lifestyle from people are increased and its involve demand of any branded stuff are go up but the people was prefer to buy a stuff with a cheap price (Illegal stuff/goods). And then the second factor are lack of firm regulation to importer who doing illegal goods import. Black Market that happened on Customs Post Office Malang, an importer who doing illegal goods only charged by officer to pay due the regulation if the importer can't pay the import charge, the good was prevented out from Customs Post Office Malang. That's why this has an impact for Government is decreased tax income by import and impact for people is decreased discipline from each individual to the regulation was set by Government.

Keywords : Black Market, Import, Black Market do, Import Tax

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik *Black Market* Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *black market* yang berkembang pesat di Kota Malang. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan peneliti untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut serta memberikan kontribusi kepada peneliti, baik moral maupun spiritual. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan.
4. Ibu Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rudy selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.

6. Ibu Mida, Bapak Aji Widi, dan Bapak Andri selaku pegawai KPPBC TMC Malang Seksi P2 yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi informan dan telah memberikan pengetahuan kepada peneliti guna penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga peneliti yaitu Bapak Suhartono dan Ibu Kusbandiyah selaku kedua orang tua, Andhito Rizqi selaku kakak yang telah memberikan dukungan, do'a, dan segalanya yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Marsha Riftyandi Arifianda yang selalu membantu dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dari SMA Azizah Nurul Hasanah yang selalu mendukung untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Ismi Julia Fylligea, Devita Firdausi, Sri Ayu, Thoharotul Islamiyah, Febby Thenisa atas dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dengan tulus ikhlas.

Demi perbaikan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 05 September 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
A. Tinjauan Empiris	11
B. Tinjauan Teoritis	14
1. Impor	14
a. Pengertian Impor	14
b. Jenis-Jenis Impor	15
c. Definisi Kepabeanan	15
d. Daerah Pabean	16
2. Barang Kiriman	16
a. Prosedur Pengambilan Barang Kiriman Pos Luar Negeri Oleh Penerima	17
b. Barang Tidak Dikuasai	18
c. Barang Dikuasai Negara	19
d. Barang Yang Menjadi Milik Negara	19
e. Barang Larangan atau Pembatasan	20
3. Bea Masuk	21
a. Definisi Bea Masuk	21
b. Tarif Bea Masuk	21
c. Pengertian Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM)	22

4. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)	23
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24
1) Pengertian PPN	24
2) Tarif PPN.....	24
b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	25
1) Pengertian PPnBM	25
2) Tarif PPnBM	26
c. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)	26
1) Pengertian PPh Pasal 22	26
2) Tarif PPh Pasal 22	28
5. Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP)	29
a. Definisi PPKP	29
b. Unsur-Unsur PPKP	30
6. Penyelundupan.....	30
a. Pengertian Penyelundupan dan Menurut Bahasa.....	30
b. Sanksi Penyelundupan	33
7. <i>Black Market</i>	43
a. Pengertian <i>Black Market</i>	43
C. Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Instrumen Penelitian	55
G. Keabsahan Data	56
H. Metode Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
B. Penyajian Data.....	79
C. Pembahasan.....	86
BAB V PENUTUP	92
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

1	Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu	11
---	---	----

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka Pemikiran.....	47
2	Analisis Data Penelitian Kualitatif.....	58
3	Prosedur Impor	86

DAFTAR LAMPIRAN

1	KPPBC TMC Malang	99
2	Surat Riset.....	100
3	Data bulanan Bea Masuk	101
4	Data bulanan PDRI	104
5	Data bulanan Penerimaan KPPBC TMC Malang.....	107
6	Pemberitahuan Impor Barang	110
7	Pedoman Wawancara	136
8	<i>Curriculum Vitae</i>	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dunia maya meningkat sangat pesat yaitu salah satu nilai jual nya adalah mengenai nilai suatu informasi dalam bisnis. Saat ini kelompok kriminal mulai mengembangkan keterampilan kejahatan dunia maya seperti *phising*, penipuan internet, pencurian identitas, dan upaya mutakhir lainnya untuk mencuri informasi pribadi. Menurut *Rasmussen College*, Semakin meningkatnya ancaman kejahatan dunia maya menemukan fakta bahwa diperkirakan kelompok kriminal yang terorganisir dengan baik dibalik praktik *black market* telah mendapatkan keuntungan kurang lebih \$388 Milliar dari identifikasi terhadap pencurian dan tindak kejahatan lain pada tahun 2011. Hebatnya, kejahatan dunia maya dengan cepat hampir menyentuh angka \$411 miliar yang melibatkan perdagangan dan penjualan narkoba ilegal, (www.destidesternity.blogspot.co.id)

Meningkatnya gaya hidup masyarakat masa kini dan tingginya ilmu teknologi yang beredar sekarang, membuat semakin tinggi pula masyarakat ingin memiliki barang-barang *branded*. Menurut Susanto dalam Nugrahani, 2003, Gaya hidup yaitu perpaduan antara kebutuhan ekspresi diri dan harapan kelompok terhadap seseorang dalam bertindak berdasarkan pada norma yang berlaku, misalnya gaya hidup hedonis, gaya hidup metropolis, gaya hidup global. Mayoritas dari barang *branded* berasal dari barang yang diimpor dari luar negeri. Untuk mendapatkan barang tersebut, banyak dari masyarakat yang memanfaatkan

beberapa portal *online* dan *e-commerce* yang berkembang pesat. Tidak sedikit pula masyarakat berbelanja barang impor *branded* melalui pasar *modern* atau *mall*, namun harga yang ditawarkan cenderung masih tinggi dan tidak terjangkau oleh beberapa kalangan masyarakat. Sebagian dari masyarakat yang majemuk tersebut adalah munculnya keinginan untuk mendapatkan barang bagus dengan harga yang rendah. Kegiatan seperti demikian mengundang para suplier untuk menyediakan barang sesuai kebutuhan konsumen dengan cara menyalahi peraturan Pemerintah, namun langkah yang diambil yaitu dengan seperti mengimpor barang tanpa membayar pajak disebut dengan Perdagangan Gelap (*Black Market*).

Black Market adalah kegiatan mengimpor atau mengekspor barang yang tidak memberitahukan kepada Bea Cukai dianggap sebagai penyelundupan atau *black market*, (Sholihin, 2010: 174). *Black market* dilakukan untuk menghindari pengenaan tarif pajak dan menghindari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Meskipun *black market* ini ilegal, namun banyak dari para pelanggan yang memilih membeli barang *black market*, karena selain murah, juga banyak barang yang ditawarkan yaitu seperti barang baru bahkan belum di rilis di Indonesia. Persepsi harga sangat memengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan suatu produk. Persepsi harga (*price perception*) berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna yang mendalam bagi mereka. Satu pendekatan untuk memahami persepsi harga adalah pemrosesan informasi, (Peter dan Olson, 2000: 228). Banyak masyarakat Indonesia yang berperan aktif di dalam praktik *black market*. Banyak

peran aktif tersebut, mulai dari pihak yang mendatangkan barang, pihak penampungan barang (*dropper* atau *dropshiper*), pihak penjual langsung melalui beberapa toko (*direct selling*), pihak yang menjadi perantara (*broker*).

Barang yang dijual dilarang beredar, barang yang dijual merupakan barang hasil curian atau selundupan sehingga tidak memiliki dokumen yang sah, barang yang dijual dibatasi peredarannya oleh pemerintah setempat, barang yang dijual harus terdapat lisensi khusus dari pemerintah setempat. Penyelundupan diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang (Marpaung: 3). Pasar gelap (*Black Market*) sangat erat kaitannya dengan penyelundupan. Penyelundupan adalah semua bentuk proses memperoleh barang yang dilarang atau yang dibatasi tersebut menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, oleh karena itu barang-barang yang terdapat di pasar gelap biasanya adalah barang hasil penyelundupan ataupun barang curian (Alliance dalam Lana, 2011).

Peredaran pakaian impor bekas di berbagai wilayah yang berhasil masuk di Indonesia dengan cara diselundupkan melalui kapal kecil dan masih banyak masyarakat yang memilih untuk membeli pakaian bekas selain karena ber-merk, harga yang ditawarkan juga relatif lebih murah. Dampak dari jual beli pakaian bekas tersebut dapat merugikan masyarakat karena rawan dengan penyakit. Menteri Perdagangan (Mendag) mengatakan, menurut penelitian laboratorium yang dilakukan Kemendag, penyakit yang ditularkan mulai dari penyakit kulit hingga HIV, (www.detik.com). Selain pakaian impor bekas masih terdapat beberapa barang yang merupakan barang impor curian (*hacking* atau *carding*)

tanpa dilengkapi dengan dokumen sesuai regulasi yang berlaku. Biasanya barang yang ditawarkan merupakan barang yang harganya relatif mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat tetapi dijual dengan harga yang relatif jauh lebih murah. Dalam membeli suatu produk konsumen tidak hanya mempertimbangkan kualitasnya saja, tetapi juga memikirkan kelayakan harganya (Sweeney, et.al, 1998:16). Masuknya barang secara ilegal atau penyelundupan sangat merugikan penerimaan negara, oleh sebab itu harus ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seperti pada kutipan data Perhimpunan Importir Seluler Indonesia (PISI) mengungkapkan:

Total peredaran ponsel impor di Indonesia sebanyak lebih dari 31 juta unit pada tahun 2007. Namun ironisnya Badan Pusat Statistik hanya mencatat sekitar 2,7 juta unit yang sah, sekitar 28 juta unit termasuk barang ilegal, termasuk di dalamnya ponsel *high-end*. Dengan maraknya peredaran *black market* di Indonesia, pemerintah membuat aturan-aturan untuk mencegah adanya pasar gelap yaitu UU No 10 tahun 1995 tentang kepabean, UU no 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dengan adanya undang-undang ini pemerintah berharap pasar gelap atau black market berkurang.

Impor barang merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean dengan melibatkan *customs*, *customs* atau instansi kepabeanan merupakan suatu organisasi yang berfungsi sebagai pengawas keluar masuknya lalu lintas barang dalam suatu negara (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2015). Tugas *customs* sendiri adalah mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang yang di impor dapat masuk kedalam daerah pabean melalui pelabuhan melalui jalur laut, dan bandara melalui jalur udara.

Berkembang pesatnya perekonomian di kota Malang mengakibatkan semakin banyaknya permintaan barang-barang yang tergolong baru yang tidak sedikit mendapatkannya dengan cara mengimpor. Pengguna jasa yang melakukan impor barang kiriman melalui pos luar negeri dapat mengambil barang kirimannya pada Kantor Pos Lalu Bea. Kantor Pos Lalu Bea adalah tempat masuknya barang-barang atau paket kiriman kantor pos luar negeri yang masuk ke dalam daerah pabean dan diawasi langsung oleh petugas Bea dan Cukai.

Kantor Pos Lalu Bea Malang yang berada di bawah naungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang merupakan tempat yang digunakan dalam hal pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri sekaligus sebagai tempat pengambilan barang impor yang dikirim melalui kantor pos. Hal tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang para pegawai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang untuk mengawasi dan memeriksa barang kiriman tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat dari masuknya barang yang dilarang dan dibatasi. Kiriman pos luar negeri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa barang kiriman pos luar negeri yang tidak termasuk dalam barang yang dilarang atau dibatasi, maka barang tersebut boleh dikirim untuk penerima barang tersebut dengan syarat nilai barang kiriman pos luar negeri melebihi FOB (Freight On Board) USD 50,00 (lima puluh Dollar), maka barang kiriman dipungut Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

(PDRI) dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, pengguna jasa kiriman pos luar negeri yang ada di Malang cukup banyak. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang tidak menyelesaikan pembayaran Bea Masuk dan PDRI yang terhutang kiriman pos luar negeri yang diterimanya dan atau ada pula barang yang tidak ada dokumen lengkap sesuai dengan prosedur ketentuan impor. Hal tersebut mengakibatkan dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) yang seharusnya sudah tertutup menjadi terbuka. Tertutup dan terbuka di sini merupakan istilah di dalam Kantor Pos Lalu Bea Malang terhadap dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP), dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) terbuka adalah dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) atas barang kiriman luar negeri yang tidak terselesaikan atau barang kiriman tidak diambil atau ditinggalkan oleh penerimanya.

Sejak Tahun 2014 Kiriman Paket Luar Negeri yang terhutang di Kantor Pos Lalu Bea Malang menunjukkan bahwa terdapat 10.629 paket diterima dan yang telah diselesaikan sesuai prosedur administrasi sebesar 9.051 paket, sisa paket yang tidak diselesaikan prosedur administrasinya yaitu sebesar 1.578 paket. Pada Tahun 2015, paket yang diterima di Kantor Pos Lalu Bea Malang sebesar 21.044 paket dan telah diserahkan kepada pemilik barang sebesar 18.937 paket, maka sisa dari paket yang tidak diselesaikan sesuai prosedur sebesar 2.107 paket. Total dari paket tahun 2014-2015 yang tidak diselesaikan sesuai prosedur oleh pemilik

paket yaitu sebesar 3.685 paket (Sumber: Kantor Pos Lalu Bea Malang, 2017). Data tersebut menunjukkan bahwa sisa kiriman pos yang tidak diselesaikan setiap tahun oleh penerimanya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam hal tidak diselesaikan yaitu barang yang tidak dibayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan juga ada indikasi merupakan barang *Black Market*. Hal tersebut menyebabkan dokumen PPKP (Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos) masih terbuka. Dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) di dalamnya menyebutkan jumlah tambahan biaya yang masih harus dibayar untuk mengambil barang kiriman pos luar negeri. Biaya yang tercantum dalam dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) merupakan penerimaan bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC Tipe Madya Cukai) Malang. Apabila dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) banyak yang masih terbuka, maka akan mempengaruhi penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui berapa besar pengaruh dari adanya Praktik *Black Market* terhadap Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Praktik *Black Market* Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh adalah:

1. Bagaimana Praktik *Black market* dapat berjalan dan berkembang di kota Malang?
2. Bagaimana Dampak praktik *black market* terhadap Pemerintah dan Masyarakat Industri di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Praktik *Black Market* dapat berjalan dan berkembang di kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Praktik *Black Market* terhadap Pemerintah dan Masyarakat Industri di Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu kontribusi, antara lain:

1. Kontribusi Teotiris

Salah satu bahan kajian dalam bidang studi Perpajakan terutama dalam bidang ekspor dan impor.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat memperoleh wawasan dan sarana untuk meningkatkan pengetahuan atas praktik *black market*.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan, dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan demi meningkatkan penerimaan negara.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berikut akan menguraikan gambaran secara garis besar dari penelitian ini dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang hal-hal yang mendasari dari penelitian penulis.

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan empiris dan teoritis, serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menyelesaikan masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian.

Dalam bab ini terdiri atas jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis yang telah dibuat. Bab ini akan menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Sebagai pembuka bab ini juga menguraikan gambaran umum penelitian dan data yang digunakan. Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang dampak adanya praktek *black market* terhadap perimaan negara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan, sehingga diharapkan kesimpulan dan saran tersebut dapat bermanfaat bagi otoritas yang bersangkutan dalam dampak adanya Praktik *Black Market*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian mengenai “Praktik *Black Market* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang” didasarkan pada penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan. Untuk menunjang analisis dan landasan teori pada penelitian ini, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

Tabel 1 Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Objek Penelitian	Lokasi Penelitian
1	Vivi Swarinata (2014)	“Mekanisme Kerja Petugas Bea dan Cukai Bandara Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika-Psikotropika”.	Para Pejabat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang dan Pelaku Penyelundupan Narkotika-Psikotropika.	Kota Balikpapan
2	Meita Ayu Kumala Dewi (2016)	“Pengaruh Pengetahuan atas Peraturan Kiriman Pos Luar Negeri dan Kesadaran Pengguna Jasa Terhadap Kepatuhan”.	Para Pejabat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang dan Para Pengguna Jasa Kiriman Pos.	Kota Malang

3	Tyas Permata Intan Sari (2016)	“Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Penerimaan KPPBC TMC Malang”.	Para Pejabat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang.	Kota Malang
---	--------------------------------	---	--	-------------

Sumber: Diolah peneliti, 2017

Penelitian mengenai “Praktik *Black Market* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang” didasarkan pada penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan. Berdasarkan skripsi karya Swarianata (2014) yang berjudul “Mekanisme Kerja Petugas Bea dan Cukai Bandara Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika-Psikotropika”, penelitian ini membahas tentang mengenai realita mekanisme kerja petugas bea cukai bandara yang mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai pelindung masyarakat secara langsung untuk mencegah adanya pemasukan barang terlarang (penyelundupan) narkotika-psikotropika yang masuk ke wilayah pabean. Diantaranya menjelaskan realita mekanisme kerja petugas bea cukai bandara dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika, melalui penumpang dan atau barang kiriman, Menjelaskan kendala yang dihadapi petugas bea cukai bandara dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan dan upaya apa yang dilakukan oleh petugas bea cukai bandara dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan melalui penumpang dan atau barang kiriman.

Dewi (2016) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan atas Peraturan Kiriman Pos Luar Negeri dan Kesadaran Pengguna Jasa Terhadap Kepatuhan”, Penelitian ini membahas tentang pengaruh secara parsial antara pengetahuan atas peraturan kiriman pos luar negeri terhadap kepatuhan dan mengetahui pengaruh secara parsial antara kesadaran pengguna jasa terhadap kepatuhan, mengetahui pengaruh secara serentak antara pengetahuan atas peraturan kiriman pos luar negeri dan kesadaran pengguna jasa terhadap kepatuhan dan mengetahui variabel dominan yang mempengaruhi kepatuhan.

Sari (2016) yang berjudul “Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan”, penelitian ini membahas tentang pengaruh bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap total penerimaan negara. Bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor berpengaruh secara signifikan terhadap Total Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang. Pemerintah sebaiknya perlu lebih memperhatikan cara pemungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang kiriman pos luar negeri, sehingga dapat meminimalisir jumlah barang kiriman pos luar negeri yang tidak dibayar atau tidak diambil oleh penerimanya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kewajiban Kepabeanan

a. Pengertian Pejabat Bea Cukai

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atau perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Fungsi, Tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- 1) Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Perencanaan, pelaksanaan , pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan dibidang pemberian pelayanan, perjanjian, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Tugas Pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan dibidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamalkan kebijaksanaan yang berlaku.

c. Definisi Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar (Jafar, 2015:2). Secara umum Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Ekspor dan Impor barang yang pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

d. Daerah Pabean

Menurut Jafar (2015: 3), Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang terdapat kegiatan tertentu. Secara umum daerah pabean adalah batas terluar wilayah Indonesia yang meliputi laut dan tanah dibawahnya.

2. Impor

a. Pengertian Impor

Berikut definisi impor yang dikemukakan, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut (Santoso dalam Febriyanti, 2012:31) mendefinisikan impor sebagai, proses memasukan barang dari luar negri ke dalam wilayah pabean dalam negeri dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menurut (Sutedi, 2014:39), Impor adalah perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan berlaku yaitu ketentuan ekspor impor yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.
- 3) Menurut (Mardiasmo, 2011:274), Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.
- 4) Menurut (Amir,M.S, 2004:139), kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia dalam negeri dari luar ngeri.

5) Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor barang adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean dari luar daerah pabean.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa Impor merupakan kegiatan memasukan barang-barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Jenis-jenis Impor

Menurut Purwito dalam Febriyanti (2012:32) dilihat dari tujuan barang, impor dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Impor untuk dipakai

- a) Memasukan barang kedalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, artinya barang tersebut akan dijual kembali atau digunakan/dipakai oleh pemakai akhir atau habis dikonsumsi.
- b) Memasukan barang kedalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

2) Impor sementara

Impor sementara merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu investor untuk menggunakan barang-barang yang dimiliki di luar daerah pabean

3. Barang Kiriman

Penyelesaian barang kiriman pos yang berasal dari luar negeri memiliki ketentuan yang berbeda dengan barang kiriman yang berasal dari dalam negeri (domestik). Ketentuan mengenai penyelesaian barang kiriman pos yang berasal dari luar negeri (impor) diatur dalam PMK-188/PMK-04/2010 tentang impor

Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan pengertian dari barang kiriman yaitu barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima di dalam negeri. Dalam hal pengiriman barang impor tersebut dapat dikirim melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT), yaitu Perusahaan yang menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu, memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait serta mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pelayanan (Perdirjen BC P-05/BC/2006). Sesuai dengan PMK-188/PMK-04/2010 tentang Impor barang yang dibawa oleh penumpang, Awak sarana pengangkut, Pelintas batas, dan Barang Kiriman, terdapat juga dua perlakuan terhadap barang kiriman pos luar negeri yang masuk kedalam daerah pabean yaitu merupakan barang kiriman yang masuk dalam kategori barang yang dibebaskan dan termasuk barang yang dikenakan BM (Bea Masuk) dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor). Dalam peraturan tersebut diatur mengenai ketentuan pembebasan pungutan impor atas barang kiriman pos jika barang kiriman pos untuk setiap orang per kiriman memiliki nilai pabean paling banyak FOB 50 US Dollar. Apabila barang kiriman pos luar negeri tersebut memiliki nilai pabean lebih dari FOB 50 US Dollar, maka atas barang kiriman pos tersebut dikenakan BM dan PDRI dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk.

Barang Kiriman Pos luar negeri yang mendapatkan pembebasan pungutan impor setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik oleh Pejabat Bea dan

Cukai dapat langsung diambil di Kantor Pos Lalu Bea atau dapat langsung dikirimkan ke alamat penerima barang. Sedangkan untuk barang yang dikategorikan terkena BM dan PDRI setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik oleh pejabat Bea dan Cukai, maka atas tagihan tersebut diterbitkan dokumen/formulir PPKP yang mencantumkan jumlah tagihan yang harus dibayarkan dibank persepsi yang telah ditunjuk untuk melunasi jumlah tagihan agar barang kiriman yang telah ditunjuk untuk melunasi jumlah tagihan agar barang kiriman yang telah dibayarkan tagihannya dapat diambil di Kantor Pos Lalu Bea.

a. Prosedur Pengambilan Barang Kiriman Pos Luar Negeri Oleh Penerima

Penerima barang kiriman Pos Luar Negeri menerima dokumen atau formulir Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos atau yang biasa disebut dengan PPKP itu harus memenuhi pungutan impor tersebut dalam formulir PPKP dengan melakukan pembayaran di Kantor Pos (Kantor Pos yang ditunjuk untuk menyerahkan barang kiriman pos), dengan membawa formulir PPKP dan formulir pembayaran SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pungutan Dalam Rangka Impor) yang telah tersedia di Kantor Pos Serah. Kemudian penerima barang menyerahkan PPKP dan SSPCP yang telah diisi dengan data sesuai pada formulir PPKP serta sejumlah uang sebesar pungutan yang tercantum pada PPKP kepada petugas pos. Setelah petugas pos melakukan penelitian dan kemudian member validasi terhadap formulir PPKP dan SSPCP, Petugas pos akan menyerahkan PPKP lembar ketiga dan SSPCP lembar pertama serta barang kiriman tersebut.

b. Barang Tidak dikuasai

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) PMK Nomor 53/PMK.04/2008 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, Barang yang menjadi Milik Negara dan Barang yang telah dinyatakan tidak dikuasai adalah:

- 1) Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya;
- 2) Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 hari sejak penimbunannya;
- 3) Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut iznnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izin;atau
- 4) Baang yang dikirim melalui Pos:
 - a) Yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim diluar Daerah Pabean;
 - b) Dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Pemberitahuan dari Kantor Pos.

c. Barang Dikuasai Negara

Pasal 1 Ayat (3) PMK Nomor 53/PMK.04/2008 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara menyatakan barang yang dikuasai oleh Negara adalah:

- 1) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan secara tidak benar dala, Pemberitahuan Pabean;
- 2) Barang dan/atau sarana pengangkat yang dicegah oleh pejabat Bea dan Cukai; atau
- 3) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan dikawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

d. Barang Yang Menjadi Milik Negara

Pasal 1 Ayat (3) PMK Nomor 53/PMK.04/2008 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara menyatakan barang yang menjadi Milik Negara adalah:

- 1) Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
- 3) Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
- 4) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan dikawasan Pabean oleh pemiliknya yang tidak dikenal dan yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
- 5) Barang yang dikuasai Negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
- 6) Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk Negara.

e. Barang Larangan atau Pembatasan

Pasal 1 Ayat (1) PMK Nomor 161/PMK.04/2007 Tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, yang dimaksud “Barang Larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean”. Ketentuan Larangan dan pembatasan impor ditetapkan oleh instansi teknis yang terkait dengan tugas DJBC, yaitu diantaranya Kementerian Perdagangan, Karantina Hewan, BPOM, Kementerian Perindustrian, Pertanian,

Kehutanan, Kesehatan dll. Instansi Teknis adalah departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen tingkat pusat yang berwenang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan barang impor atau ekspor. Ketentuan Pengawasan LARTAS sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu untuk kepentingan pengawasan, instansi terkait wajib memberitahukan Menkeu, yang kemudian akan diatur lebih lanjut oleh Menkeu. Semua barang LARTAS yang tidak memenuhi syarat, atas permintaan importir/ekportir dapat dibatalkan eksponnya, diekspor kembali, atau dimusnakan dibawah kewenangan DJBC. Sedangkan untuk barang LARTAS yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai Negara, kecuali barang tersebut ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

4. Bea Masuk

a. Definisi Bea Masuk

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, “Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ii yang dikenakan terhadap barang yang diimpor”. Menurut Jafar (2015: 17), “Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai”. Secara umum setiap barang yang dimasukkan ke daerah pabean terutang Bea Masuk, namun demikian kewajiban membayar Bea Masuk tidaklah pada waktu barang masuk daerah pabean melainkan pada waktu barang tersebut diimpor untuk dipakai.

Menteri Keuangan berwenang untuk membebaskan Bea Masuk atas Barang yang diimpor dengan alasan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang. Jadi secara umum, Bea Masuk merupakan pungutan negara untuk barang impor yang harus dibayarkan pada waktu barang diimpor untuk dipakai atau sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Menteri Keuangan.

b. Tarif Bea Masuk

Menurut Jafar (2015: 17), "untuk menghitung Bea Masuk dan pungutan Impor lainnya, diperlukan informasi besarnya tarif dan nilai pabean, tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembebasan Bea Masuk atau Bea Keluar". Atas pengenaan tarif Bea Masuk sesuai dengan Undang-Undang yang ada yaitu atas barang impor dipungut dan Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

Selain mengenai tarif tersebut ditetapkan tarif Bea Masuk atas Barang yang diimpor dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang (Pasal 12) di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, istilah tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembebasan Bea Masuk ataupun Bea Keluar.

c. Pengertian Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM)

Nilai dasar penghitungan bea masuk atau yang disingkat NDPBM adalah nilai tukar yang dipergunakan untuk dasar penghitungan bea masuk. Dalam menghitung bea masuk, maka persentase tarif bea masuk, PPN, dan PPH akan dikalikan dengan NDPBM yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumus penetapan NDPBM dan cara menghitung bea masuk, PPN, dan PPH yang peneliti peroleh dari website resmi www.bctelukbayur.beacukai.go.id yang diakses tanggal 27 Maret 2017 adalah :

Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM)

$$= \text{Cost} + \text{Insurance} + \text{Freight} = \text{CIF}$$

Untuk barang impor melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) atau biasa disebut kantor pos, tata cara penghitungan sama dengan formula diatas hanya sebelum nya harga barang dikurangi dengan nilai yang diberikan pembebasan terlebih dahulu yaitu sebesar FOB (Freight On Board) USD 50,00. Untuk barang yang nilainya atau harganya dibawah USD 50,00 dibebaskan dari pungutan bea masuk dan ajak dalam rangka impor atau PDRI.

- 1) Bea Masuk = (CIF) * tarif bea masuknya (Klasifikasi Barang)
- 2) PPN = (CIF + Bea Masuk) * 10%
- 3) PPH = (CIF + Bea Masuk) * 7,5%

Menurut Desi (2015), Cara Penentuan Nilai CIF adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Harga CIF adalah FOB + Freight + Insurance
- 2) Harga FOB adalah harga barang impor sampai dengan barang dimuat diatas kapal di pelabuhan laut. Harga FOB biasanya tertera di *Invoice* atau faktur.
- 3) *Freight* adalah biaya pengangkutan ari pelabuhan muat di luar negeri sampai pelabuhan bongkar muat di Indonesia.
- 4) *Insurance* adalah biaya asuransi pengangkutan dari pelabuhan muat di luar negeri sampai dengan pelabuhan bongkar di Indonesia. Biaya

yang dihunakan sebagai komponen dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebagaimana yang tercantum dalam polis asuransi.

5. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Jafar (2015: 82) menjelaskan bahwa, Pajak Dalam Rangka Impor atau PDRI ini merupakan pungutan impor dari jenis pajak yang dapat berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana pengenaan dalam satu tarif yaitu sebesar 10%. Jenis Pajak kedua adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dimana tarifnya bervariasi sesuai dengan tingkat kemewahan barang yang diimpor. Selanjutnya yang ketika adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22).

Jadi Pajak Dalam Rangka Impor atau biasa disebut PDRI, adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor Barang yang terdiri dari Pajak Penghasilan atau yang disebut PPN, kemudian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan yang selanjutnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22).

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Pengertian PPN

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu, “PPN adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

Menurut Mardiasmo (2011: 273), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

Secara umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang dan jasa dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara.

2) Tarif PPN

“Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen)” (Mardiasmo, 2011: 286). Sehingga tarif PPN yang dikenakan terhadap barang kiriman pos dari luar negeri atau impor sesuai dengan tarif PPN yang berlaku saat ini sebesar 10%. Tarif itu sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku yaitu Undang-Undang PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009.

b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

1) Pengertian PPnBM

Menurut Suandy (2011: 58), “PPnBM adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah”. PPnBM hanya dikenakan satu kali kepada sumbernya yaitu pabrikan atau saat impor dan tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan/atau;

d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terhutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak. Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah:

- 1) Harga Jual
- 2) Penggantian
- 3) Nilai Impor
- 4) Nilai Ekspor
- 5) Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2) Tarif PPnBM

Menurut Mardiasmo (2011: 287), "tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu paling rendah 10% dan paling tinggi 200%". Ketentuan mengenai tarif kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Keuangan.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang harus dibayar importir adalah hasil perkalian dari persentase (%) tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung PPnBM atas Barang kiriman Pos Luar Negeri adalah Nilai Impor.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN 1984 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Mardiasmo, 2011: 289).

c. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)

1) Pengertian PPh Pasal 22

Waluyo (2011: 73) menjelaskan bahwa, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Mengenai PPh Pasal 22 tersebut sudah dijelaskan pula pada Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, selanjutnya diikuti dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.

Pemungut pajak penghasilan pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas Impor barang.
- b) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.

- c) Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- d) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk membayar langsung kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- e) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh kepala kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- f) Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- g) Industri dan Importir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh kepala kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang atau pengepul.

Dalam hak pelaksanaan impor barang yang berhak memungut adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ini sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 22, Pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dan melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan dan pengenaan pajak yang tepat waktu.

2) Tarif PPh Pasal 22

Menurut Waluyo (2011: 275) besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yaitu ditetapkan sebagai berikut:

- a) Yang menggunakan angka pengenal impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor, dan/atau:
- b) Yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

Nilai impor disini adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan dibidang impor (Mardiasmo, 2011:230).

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terutang pada saat pembayaran kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Atas kegiatan impor barang, PPh Pasal 22 terutang pada saat bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Apabila pembayaran Bea Masuknya ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 terutang pada saat penyelesaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang).

6. Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP)

a. Definisi PPKP

Pencacahan Paket Kantor Pos (PPKP) adalah dokumen hasil pemeriksaan Pabean yang memuat tentang jenis barang, jumlah barang,

nomor *Asean Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) dan tarif Bea Masuk dan perhitungan Bea Masuk dan pajak-pajak lainnya untuk kemudian PPKP diserahkan kembali ke Kantor Pos dengan pengantar Pos Pabean 22B (PP22B) (bppk.kemenkeu.go.id diakses tanggal 27 Maret 2017).

Dengan demikian jumlah paket pos berdasarkan PP22A harus sama dengan PP22B untuk kemudian diserahkan kepada penerima melalui Kantor Pos Penyerahan Barang Kiriman.

Monitoring dan Pengawasan Penerimaan Negara merupakan Sistem administrasi Pabean sebagaimana jumlah penerimaan negara yang tercatat pada dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos atau yang sering disebut dengan PPKP, harus dapat dimonitor realisasinya, mengingat terdapat kemungkinan penerima paket pos menolak menerima barang karena tagihan Bea Masuk yang besar atau alamat tujuan tidak ditemukan atau barang rusak karena tidak diambil oleh pihak penerima barang.

b. Unsur-Unsur PPKP

Dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP), terdapat beberapa unsur yang dapat mempengaruhi besarnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayar oleh penerima Kiriman Pos Luar Negeri. Beberapa unsur tersebut adalah:

- 1) Bea Masuk
- 2) Cukai
- 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22)

7. Penyelundupan

a. Pengertian Penyelundupan dan Menurut Bahasa

Penyelundupan atau menyelundup sebenarnya istilah yuridis. Penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dari atau dalam negeri dengan latar belakang tertentu (Hamzah:1).

Pengertian penyelundupan dalam bahasa Inggris “*smuggle*” dan dalam bahasa belanda “*smokkel*” yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang yang tidak memenuhi peraturan perUndang-Undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas Pabean yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Soufnir: 5).

Penyelundupan diartikan Pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang (Marpaung: 3).

Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *Smuggle* diartikan sebagai berikut:

To import or export secretly to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law.

(mengimpor atau mengekpor secara gelap, berlawanan hukum atau tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (*smuggling*) sebagai: *The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled goods are liable to confiscation and smugglers are liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is greater); offenders may alternatively, or additionally, receive a term of imprisonment*”.

Menurut WCO *Hanbook for Commercial Fraud Investigators*, ada enam belastipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu :

1. Penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah menimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
2. Uraian Barang Tidak Benar. Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan
3. Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
4. Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.

5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
6. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor. Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
11. Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen. Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu
13. Transaksi Gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.
14. Pelanggaran Pengembalian Bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
15. Usaha Fiktif. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
16. Likuidasi Palsu. Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah sering dikenakan tambahan bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan perusahaan baru.

b. Sanksi Penyelundupan

Menurut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pasal 1 ayat 2 mengenai Tindak Pidana Penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakanyang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Didalam Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai berikut:

“Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai

penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat

kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku.

Berikut ini rincian bunyi masing-masing pasal Tindak Pidana Penyelundupan dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan:

Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan. Setiap orang yang:

- (a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- (b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- (d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.
- (e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan

pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;

- (g) mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- (h) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan, setiap orang yang:

- (a) mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- (b) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- (c) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- (d) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- (e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102B Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi sendi perekonomian negara; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan:

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang—undang ini ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Pasal 102D Undang—Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan: Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pasal 103 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan;

Setiap orang yang:

- (a) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- (b) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- (c) memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- (d) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103A Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan:

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan

Setiap orang yang:

- (a) mengangkut barang yang berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;

- (b) memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- (c) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
- (d) menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dan perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105 Undang—Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 106 dihapus. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 107 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 107 sehingga penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.

Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - (a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
 - (b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dan tindak pidana, dirampas untuk negara.

(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.

(1) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

8. *Black Market*

a. Pengertian *Black Market*

“*Black Market* adalah mengimpor atau mengekspor barang yang tidak memberitahukan kepada Bea Cukai dianggap sebagai penyelundupan atau *black market*”, (Sholihin, 2010: 174)

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan](#) UU Kepabeanan, dikutip sebagai berikut:

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang :
 - a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
 - h. mengambil sidik jari orang;
 - i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
 - j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;

- n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. menghentikan penyidikan;
- p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bahwa terdapat sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 7A ayat (2) UU Kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU Kepabeanan yang kami kutip sebagai berikut:

Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

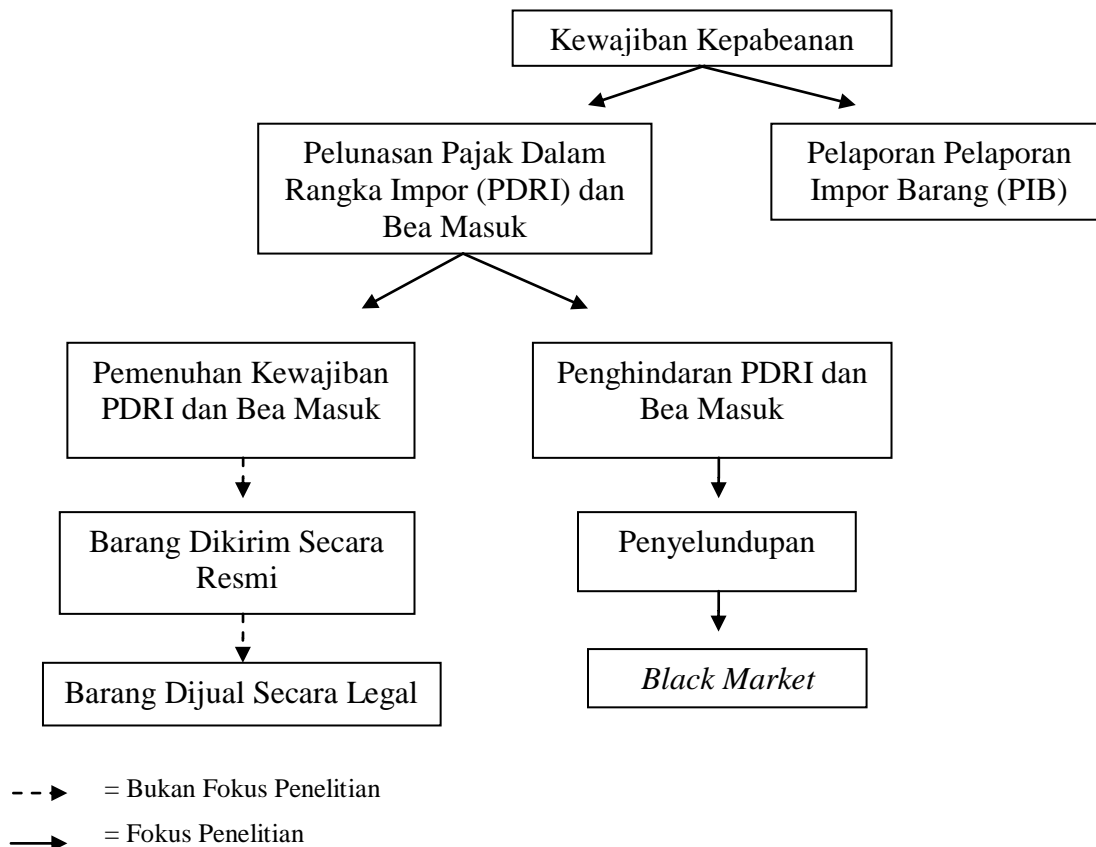
Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Suriasumantri (Sugiono, 2015:92), kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Barang impor dan barang kiriman bisa tergolong dalam barang kena pajak jika nilai nya lebih dari \$250 untuk perorangan dan \$1000 untuk keluarga. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang enggan memenuhi kewajiban PDRI dan Bea masuk atas barang yang dibawa ke Indonesia. Upaya penghindaran kewajiban ini merupakan faktor yang paling mendasar terjadinya penyelundupan barang dan praktik *blackmarket*.

Penelitian ini dilakukan terhadap DJBC sebagai instansi yang menangani barang impor dan barang kiriman di Indonesia. Sebagaimana diketahui, penerimaan negara terbesar salah satunya dari pendapatan pajak atas barang impor. Maka dari itu peran DJBC menjadi sangat penting bagi penerimaan negara untuk melakukan pengawasan dan menjalankan prosedur yang berlaku agar praktik penyelundupan dan *blackmarket* dapat dicegah.

Untuk mencegah terjadinya praktik *blackmarket* dibutuhkan peran serta semua pihak dari pengawasan dan pencegahan penyelundupan oleh DJBC hingga kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban PDRI dan Bea masuk sesuai undang-undang yang berlaku. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan ke dalam gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah peneliti, 2017

Penjelasan:

Dalam pemenuhan Kewajiban Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT (Perusahaan Jasa Titipan) dan melengkapi dokumen-dokumen impor. Kemudian di bagian menghitung bea masuk dan PDRI nya terdapat kemungkinan terjadinya Pemenuhan kewajiban PDRI dan Bea masuk dan terjadi Penghindaran atas PDRI dan Bea Masuknya. Dalam hal untuk Penghindaran pembayaran atas Bea Masuk dan PDRI ini menyebabkan terjadinya upaya pemasukkan barang secara ilegal (penyelundupan). Kemudian setelah barang diselundupkan, barang tersebut dijual secara ilegal di pasar gelap atau biasa disebut dengan *Black Market*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Guna mendapat hasil yang baik dalam suatu penelitian yang akan dilakukan ini, maka diperlukan suatu teknik tertentu secara ilmiah yang dapat disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam rangka mencapai tujuan dan kegunaan tertentu dalam hal ini supaya penelitian yang dimaksud dapat berjalan sesuai dengan prosedur bagaimana peneliti ini dilaksanakan. Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses proses penelitian (Anggoro, 2008:11). Menurut Anggoro (2008:11) penelitian ini diartikan sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah. Dengan demikian metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara penelitian yang yang dilakukan, termasuk prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan dalam penelitian, termasuk didalamnya seperti jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap, yang dibentuk

dengan kata-kata melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam latar ilmiah (Cresswell, 1994:1).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memadukan pengetahuan dan informasi untuk menemukan keterkaitan dan hubungan yang logis yang mungkin terjadi dan semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Sugiyono, 2011:50).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang memeriksa fenomena dari dasar, selalu terbuka, dan melibatkan strategi serta orang lain dalam mengerjakan penelitian yang bekerja dengan standar (Gunawan, 2013:105). Menurut Moleong (2013:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sesuatu yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian dan menjadi bagian-bagian yang menjadi pedoman dalam suatu penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam menentukan data mana yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Fokus penelitian berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2014:217). Fokus penelitian ini ditujukan untuk memberikan batasan-batasan permasalahan yang diteliti sehingga

penelitian menjadi spesifik dan terarah. Dengan demikian, untuk memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Fokus penelitian ini adalah :

- 1) Praktik *Black Market* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang.
- 2) Dampak Praktik *Black Market* terhadap Pemerintah dan Masyarakat Industri di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memberikan informasi terkait wilayah atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang peneliti teliti. Lokasi penelitian digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang peneliti butuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun lokasi penelitian yang peneliti tuju ialah Kota Malang.

Situs penelitian merupakan letak yang sebenarnya peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang akurat, valid dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang. Alasan pemilihan situs penelitian ini Karena Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang merupakan yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Malang, salah satunya pengawasan atas barang-barang impor yang masuk dan keluar di Kota Malang.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) didalam Moleong (2014:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan* , selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan menurut Azwar (2013:19), berdasarkan sumbernya, data dapat digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Didalam penelitian kualitatif lebih cenderung mengutamakan wawancara dan observasi dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Sehingga penelitian memerlukan data, baik data untuk deskripsi maupun untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer.

Data primer merupakan data yang dapat berupa kata-kata serta tindakan yang diamati peneliti terhadap objek atau subjek penelitian (Fuad dan Nugroho, 2014:57). Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara. Informan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Informan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan langsung dengan Kepala bagian seksi penyidikan dan barang hasil penindakan KPPBC Tipe Madya Kota Malang sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pada seksi penyidikan dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pegawai seksi penindakan sebagai pelaksana pemeriksaan barang-barang impor yang datang dan yang akan diberikan kepada penerima barang yang

harus menyelesaikan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga peneliti mendapatkan banyak manfaat terkait Praktik *Black Market* di Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang berupa sumber tertulis yang telah diolah dari berbagai sumber bacaan seperti surat kabar, artikel, dokumen-dokumen resmi, buletin, dan lain sebagainya. Penggunaan data sekunder berfungsi untuk memperkuat penemuan peneliti dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sehingga akan menambah keyakinan penulis terhadap suatu kesimpulan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan yang dilakukan baik dengan penelusuran data online maupun data yang berasal dari dokumen yang diperoleh peneliti di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan atau cara untuk memperoleh atau mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti akan digunakan sebagai bahan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Maka dari itu dibutuhkan cara-cara yang tepat untuk melakukan pengumpulan data yang akurat dalam menjawab permasalahan masalah yang ada. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Wawancara

Menurut Moeleong (2014:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu interaksi antara peneliti dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian melalui tanya jawab secara lisan. Didalam interaksi tersebut akan menghasilkan informasi ataupun keterangan-keterangan yang dibutuhkan sebagai data penelitian. Adapun informan yang terkait penelitian ini adalah :

- a) Bapak Arief Hartono selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kota Malang.
- b) Bapak Tri Hartana selaku Kepala Seksi Penyidikan dan BHP Kota Malang.
- c) Bapak Raden Pandam. P. H selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I Kota Malang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek pajak sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Moleong, 2014:143). Mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai dokumen, baik yang berupa buku laporan, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen tertulis dari pendapat para ahli dari berbagai tulisan ilmiah yang ada keterkaitannya dengan topik penelitian ini. Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pengumpulan data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Wisadarima (200:59) alat pengambil data atau instrumen dalam suatu penelitian menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan dan kualitas tersebut menentukan kualitas penelitiannya, oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian harus dibuat dengan cermat.

Adapun instrumen penelitian yang peneliti pilih dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti Sendiri.

Instrumen paling utama dan terpenting dalam sebuah penelitian adalah peneliti itu sendiri. Hal tersebut karena jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data analisis, dan menjadi pelapor dari hasil kegiatannya. Oleh sebab itu peneliti harus masuk menjadi salah satu alat penelitian.

Peneliti Sendiri menurut Nasution (1998) didalam Sugiyono (2013:223) menyatakan :

“ Didalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang

penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat dicapai”.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara, merupakan garis besar yang akan ditanyakan pada saat proses wawancara. Pedoman wawancara ini bertujuan agar pencarian data dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman wawancara berisi tentang daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk memudahkan dalam arah wawancara yang akan dilakukan.

3. Perangkat Penunjang

Merupakan alat tulis atau alat-alat lain yang akan digunakan oleh peneliti dalam keperluan penelitian. Alat-alat ini berguna untuk menangkap data atau informasi dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Didalam alat penunjang ini juga terdapat catatan lapangan yang berguna untuk mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penelitian.

4. Alat Dokumentasi

Merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk merekam atau mengambil gambar gambar selama proses wawancara atau penelitian berlangsung. Alat dokumentasi ini akan menjelaskan secara visual suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

G. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teori dan triangulasi teknik pengumpulan

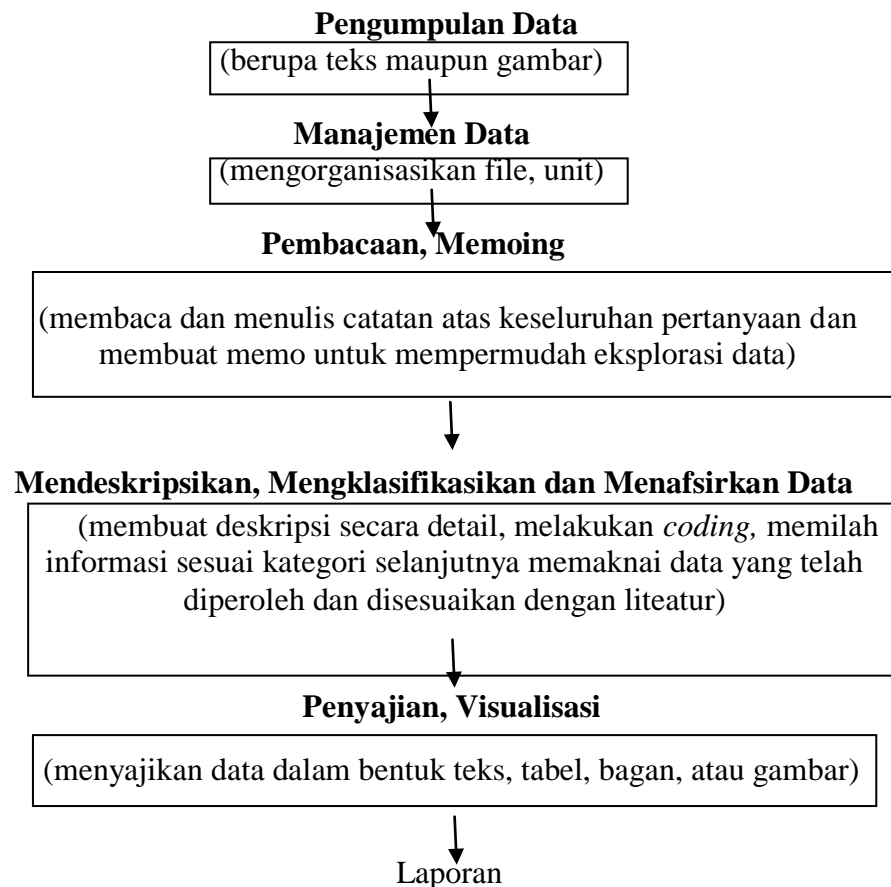
data. Menurut Moleong (2012:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Penelitian ini menggunakan 2 triangulasi yaitu triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan sumber informasi dari informan yang berbeda atau membandingkan suatu keadaan dari berbagai pendapat dan pandangan guna menemukan pendapat yang sebenarnya mengenai keadaan penelitian sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dari semua pendapat yang diberikan oleh informan yang berbeda (Moleong, 2012:331).

Triangulasi dengan teori maksudnya jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka sangat penting mencari tema ataupun penjelasan pembanding atau penyaing. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penelitian lainnya. Secara logika dapat dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lainnya dan kemudian melihat apakah kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat ditunjang oleh data (Moleong, 2012:332).

H. Analisis Data

Metode analisis data yaitu suatu teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dimulai dengan cara menyiapkan data dan mengorganisasikan data untuk dianalisis, kemudian mereduksi data menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan (creswell, 2014:25). Peneliti menggunakan metode analisis model

Cresswell dalam penelitian ini. Langkah-langkah dalam menganalisis data digambarkan oleh Cresswell (Lazuardi, 2014:255) adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Analisis Data Penelitian Kualitatif

Sumber: Creswell, 2014 (Data diolah Peneliti, 2017)

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama yaitu pengumpulan data, data yang dikumpulkan yakni berupa transkrip dari hasil wawancara dan dari dokumentasi. Hasil wawancara berupa transkrip wawancara yang ditulis dari hasil wawancara dengan informan yang terkait, data dokumentasi didapatkan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang yang dalam hal ini merupakan situs penelitian. Data-data yang terkumpul yaitu data primer dan data sekunder.

2. Manajemen Data

Tahap selanjutnya yaitu data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi akan diorganisir dalam file-file komputer dan mengonversinya menjadi satuan teks yang sesuai untuk analisis, baik berupa tangan ataupun dengan komputer dan ditempatkan dalam sebuah *database* yang besar. Data dari hasil wawancara dan dokumentasi akan disimpan dalam sebuah *database* dan kemudian disusun menjadi sebuah teks untuk dianalisis. Penulis dalam tahap ini akan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari pengumpulan data terkait dengan Data penerimaan Barang-Barang impor yang masuk di Kota Malang.

3. Membaca dan Membuat Memo (*memoring*)

Pada tahap ini, transkrip-transkrip wawancara akan dibaca secara menyeluruh yang akan diberikan makna sebelum memecahnya menjadi bagian-bagian, selanjutnya dari catatan lapangan atau transkrip tersebut pada bagian tepinya akan ditulis catatan atau memo. Transkrip-transkrip hasil wawancara dan data dokumentasi yang telah disusun menjadi sebuah teks dapat langsung dianalisis kemudian akan dibaca secara keseluruhan dan diberikan catatan kecil atau memo pada bagian tepinya. Data hasil wawancara ataupun data dokumentasi dan data berupa laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian akan disusun menjadi sebuah teks dalam penyajian data untuk kemudian dapat langsung dianalisis.

Dalam tahap ini peneliti akan menulis catatan-catatan khusus di catatan kecil atau memo setelah transkrip hasil wawancara dan data dokumentasi yang diperoleh selama penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang yang disusun menjadi teks dan dibaca secara keseluruhan.

4. Mendeskripsikan, Mengklasifikasikan, dan Menafsirkan Data

Selanjutnya ditahap ini, data yang diperoleh baik berupa teks transkrip wawancara dan visual akan dibuat diskriptif secara detail, dikembangkan dalam tema atau dimensi, dan diberikan penafsiran yang sesuai dengan perspektif yang terdapat dalam literatur. Penelitian ini dalam prakteknya, data-data yang telah diberikan catatan kecil berupa memo dibagian tepi yang kemudian akan diklasifikasikan ke dalam tema atau kategori yang lebih luas, selanjutnya akan dideskripsikan.

5. Menyajikan dan Memvisualisasikan Data

Tahap ini merupakan fase akhir dari spiral Cresswell. Peneliti diharuskan untuk mengorganisasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan merangkai keterkaitan antar data. Cara menyajikan data dapat dikemas dalam bentuk teks, tabel, bagan, atau gambar. Tentunya sel-selnya memuat teks, bukan angka. Tujuan dari proses ini yaitu agar hasil dari penelitian dapat lebih menarik dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan yang membacanya. Peneliti telah melakukan analisis data sesuai analisis Cresswell dan menghasilkan laporan penelitian mengenai Praktik *Black Market* Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Malang

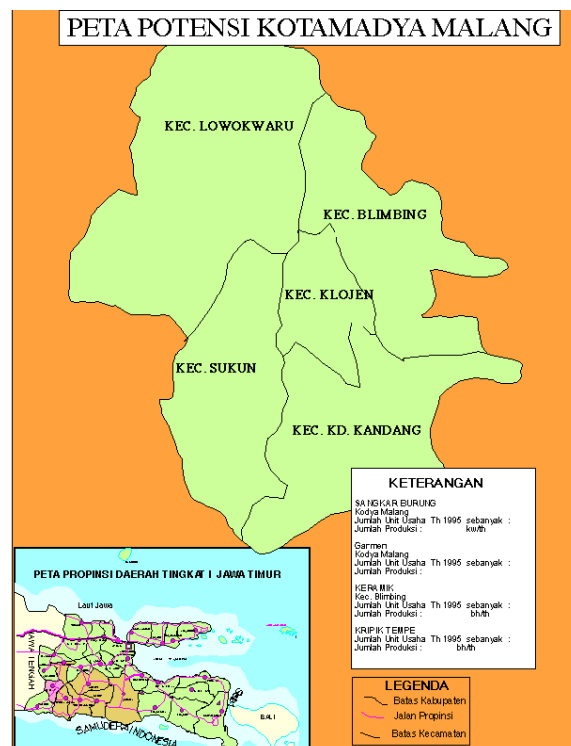
a. Kondisi Geografis Kota Malang

Kota Malang merupakan kota yang berlokasi di bagian daerah tengah Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu kota tujuan wisata di provinsi ini. Kota Malang dikelilingi dengan wilayah Kabupaten Malang dan berbatasan dengan Kota Batu di sebelah barat. Secara astronomis, Kota Malang terletak pada garis $112^{\circ} 34' 9'' - 112^{\circ} 41' 34''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 54' 2'' - 8^{\circ} 3' 5''$ Lintang Selatan. Kota Malang memiliki ketinggian antara 400 - 667 meter diatas permukaan laut (mdpl). Kota Malang memiliki suhu udara yang cukup sejuk dengan rata-rata $24,13^{\circ} \text{C}$ dan memiliki kelembapan udara sekitar 72%. Kota Malang memiliki curah hujan rata-rata 1883 milimeter per tahun. Kota Malang pun dikelilingi oleh beberapa gunung yang membuat kota ini menjadi daya tarik seseorang untuk dikunjungi dengan tujuan destinasi pariwisata. Beberapa gunung tersebut diantara lain adalah bagian sebelah Barat terdapat Gunung Arjuno dan Gunung Panderman, di bagian sebelah Barat Laut terdapat Gunung Anjasmoro dan Gunung Welirang. Sementara bagian sebelah Barat Daya terdapat Gunung Kawi dan Gunung Kelud, di bagian sebelah Timur terdapat Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Keadaan geografis yang seperti ini semakin menunjang Kota

Malang memiliki kondisi udara yang cukup sejuk. (www.malangkota.go.id, 2016)

b. Batas Wilayah Kota Malang

Kota Malang memiliki batasan-batasan yang jelas atas daerah yang menjadi kekuasaan wilayahnya. Berikut terlihat pada gambar 4 (empat) di bawah ini untuk memperjelas batasan wilayah atas Kota Malang sebagai berikut :



Gambar 4. Peta Wilayah Kota Malang

Sumber : www.malangkota.go.id, 2017

Batasan-batasan antar wilayah Kota Malang dapat terlihat sebagai berikut :

Sebelah Utara :Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso.

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.

(www.malangkota.go.id, 2017)

c. Kondisi Demografis dan Sosiologi Kota Malang

Kota Malang memiliki luas wilayah seluas 110,06 km² dengan total keseluruhan jumlah penduduk hingga akhir periode April 2016 perkiraan sekitar 887.443 jiwa penduduk. Tingkat kepadatan penduduk kota Malang rata-rata mencapai 8.461 jiwa per km². Penduduk kota Malang tersebar di 5 kecamatan, 57 kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT yang beredar di wilayah kota Malang. Untuk memperjelas pengklasifikasian atas penyebaran kecamatan beserta kelurahan/desa yang berada di wilayah kota Malang, dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Klasifikasi Penyebaran Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kota Malang

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa
1	Blimbing	Arjosari, Blearjosari, Blimbing, Bunulrejo, Jodipan, Kesatrian, Pandanwangi, Polehan, Purwantoro, Purwodadi.

Lanjutan Tabel 8

2	Kedungkandang	Arjowinangrum, Bumiayu, Buring, Cemorokandang, Kedungkandang, Kota Lama, Lesanpuro, Madyopuro, Mergosono, Sawojajar, Tlogowaru, Wonokuyo.
3	Klojen	Bareng, Celaket, Gading Kasri, Kasin, Kauman, Kidul, Oro-oro Dowo, Penanggungan, Rampal, Samaan, Sukoharjo.
4	Lowokwaru	Dinoyo, Jatimulyo, Ketawanggede, Lowokwaru, Merjosari, Mojolangu, Sumbersari, Tanjungsekar, Tasikmadu, Tlogomas, Tulusrejo, Tunggulwulung.
5	Sukun	Bakalan, Bandulan, Ciptomulyo, Gadang, Karangbesuki, Kebunsari, Krajan, Mulyorejo, Pisangcandi, Sukun, Tanjungrejo.

Sumber : www.malangkota.go.id, 2017

Kekayaan sumber etnik dan budaya wilayah kota Malang terkenal dinamis, religius, pekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang yang sering disebut AREMA. Penduduk asli Malang berasal dari berbagai campuran macam etnik budaya seperti suku Jawa, Madura, dan beberapa keturunan Arab dan Cina. Kota Malang juga memiliki kesenian tradisional, salah satu yang terkenal adalah seni tari topeng. Tari topeng merupakan pertemuan gaya kesenian Blambangan dengan gaya kesenian Jawa Tengah dan disertai gaya kesenian Jawa Timur-Selatan. Gaya bahasa yang digunakan di kota Malang adalah bahasa Jawa kasar yang tegas, lugas, dan tidak basa-basi.

d. Visi dan Misi Kota Malang

Kota Malang memiliki visi dan misi tersendiri yang membedakan dengan kota-kota lainnya yang berada di negara Indonesia ini. Visi dari kota Malang

adalah “Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”. Kata “**Bermartabat**” memiliki arti terselubung yang berarti **BERSih, Makmur, Adil, Religius toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik**. Dari pejabaran tersebut diharapkan wilayah kota Malang dapat menjadi kota yang aman, bersih, asri, tertib, dan memiliki masyarakat yang makmur, sejahtera, terdidik, berbudaya, mandiri, dan memiliki sikap toleransi terhadap ragam perbedaan yang terdapat di lingkungan sekitar dengan meninggikan nilai-nilai religiusitas sehingga tidak menimbulkan kesenjangan-kesenjangan yang dapat memicu perselisihan di kalangan bermasyarakat. Diharapkan dapat mewujudkan tuntutan reformasi dalam sistem politik pemerintah daerah kota Malang yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang saat ini masih saja berkembang dengan pesat di negara Indonesia terutama dalam hal berpolitik dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada wawasan kebangsaan, persatuan, kesatuan, otonomi daerah, iman, takwa, budi pekerti, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan demokrasi.

Kota Malang memiliki beberapa misi yang ingin dicapai guna mewujudkan program visi kota Malang yakni sebagai berikut :

- 1) Mendayagunakan dan mengembangkan secara optimal atas potensi daerah yang berwawasan lingkungan dengan berkesinambungan, adil, dan ekonomis.
- 2) Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas industri perekonomian

dalam skala besar yang mampu berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan etis.

- 3) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya, dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamais, toleran, dan sepadan.
- 4) Mewujudkan kota Malang sebagai kota pendidikan dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kota Malang sehingga mampu bersaing di era global.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terarah, dan akuntabel.
- 6) Mengembangkan sistem sarana transportasi secara terpadu sekaligus infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat kota Malang.
- 7) Mendorong para pelaku ekonomi pada sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif dalam bersaing.
- 8) Mewujudkan kota Malang sebagai kota yang sehat dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kota Malang secara segi fisik dan kejiwaan sehingga dapat menjadi masyarakat yang produktif.
- 9) Mewujudkan kota Malang sebagai salah satu kota tujuan wisata di negara Indonesia yang aman, nyaman, dan kaya akan budaya dan moral.

(www.malangkota.go.id ,2017)

2. Gambaran Umum Situs Penelitian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan sebuah instansi yang berada dibawah kekuasaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI) yang memiliki tugas melayani dan mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar di wilayah daerah pabean. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga melakukan pemungutan atas bea masuk, bea keluar, dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki 11 (sebelas) Kantor Direktorat, 16 (enam belas) Kantor Wilayah, dan 2 (dua) Kantor Pelayanan Utama. Untuk wilayah Jawa Timur terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur II. Untuk kota Malang, terdiri dari 1 (satu) kantor operasional instansi yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, yang berlokasi di Jalan Surabaya No.2 Malang.

a. Sejarah Singkat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang

Seiring dengan berjalannya waktu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan. Berikut dalam tabel 9 (sembilan) pada halaman 77 akan dijelaskan secara rinci terjadinya perkembangan dalam beberapa periode sebagai berikut :

Tabel 9. Perkembangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang

Nomor	Tahun	Perubahan
1	1914 – 1944	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang masih bernama “De Dienst der In-er Uitveprrechten en Accynzen (IUA)” yang beralamatkan di Jalan Merdeka Selatan Malang.
2	1945 – 1946	“De Dienst der In-er Uitveprrechten en Accynzen (IUA)” berubah nama menjadi “Kantor Jawatan Bea dan Cukai”, dan lokasi tempat masih tetap di Jalan Merdeka Selatan Malang.
3	1947 – 1949	Nama instansi tetap sama yaitu “Kantor Jawatan Bea dan Cukai”, tetapi alamat lokasi telah berpindah ke Jalan Agung Suprpto Malang.
4	1950 – 1966	Nama instansi tetap sama yaitu “Kantor Jawatan Bea dan Cukai”, tetapi alamat lokasi telah berpindah ke Jalan Sultan Agung Malang.
5	1967	“Kantor Jawatan Bea dan Cukai” telah berubah nama menjadi “Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”, dan alamat lokasi berpindah ke Jalan Surabaya Nomor 2 Malang yang telah menjadi alamat tetap hingga sekarang.
6	1968 – 1969	“Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” telah berubah nama menjadi “Kantor Cabang Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang”.
7	1970 – 1985	“Kantor Cabang Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang” telah berubah nama menjadi “Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang”.

Lanjutan Tabel 9

8	1986 – 1989	“Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang” telah berubah nama menjadi “Kantor Inspeksi Tipe B3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang”.
9	1990 – 1993	“Kantor Inspeksi Tipe B3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang” telah berubah nama menjadi “Kantor Inspeksi Tipe A3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang”.
10	1994 – 1997	“Kantor Inspeksi Tipe A3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang” telah berubah nama menjadi “Kantor Inspeksi Tipe A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang”.
11	1998 - 2007	Berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.32/KMK.01/1998, menyatakan bahwa “Kantor Inspeksi Tipe A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang” telah berubah nama menjadi “Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Malang”.
12	2008	Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-46/BC/2008, menyatakan bahwa “Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Malang” telah berubah nama menjadi “Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (KPPBC Tipe Madya Cukai Malang)”.

Sumber : www.beacukaimalang.com , 2017

b. Visi, Misi dan Motto Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang memiliki visi, misi, dan motto terhadap kegiatan rancangan

kerjanya. Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang adalah sebagai berikut “Menjadi kantor modern terbaik dalam hal pengawasan dan pelayanan di bidang cukai”, sedangkan untuk misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang adalah “Pelayanan terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat”. Motto yang digunakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang sebagai acuan dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi-nya (TUPOKSI) adalah sebagai berikut “Tanggap melayani, tegas mengawasi”.

(www.beacukaimalang.com, 2017)

c. Batas Wilayah Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang memiliki 3 (tiga) wilayah batas kerja yang meliputi daerah tingkat II se-Malang raya yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Berikut batasan wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Malang :

Wilayah Utara	: Kecamatan Lawang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.
Wilayah Selatan	: Kecamatan Sumberpucung berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
Wilayah Timur	: Kecamatan Dampit berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.
Wilayah Tenggara	: Kecamatan Sumbermanjing Wetan berbatasan dengan Laut Selatan.

Wilayah Barat :Kecamatan Kasembon berbatasan dengan Kabupaten Kediri.

(www.beacukaimalang.com, 2017)

d. Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang

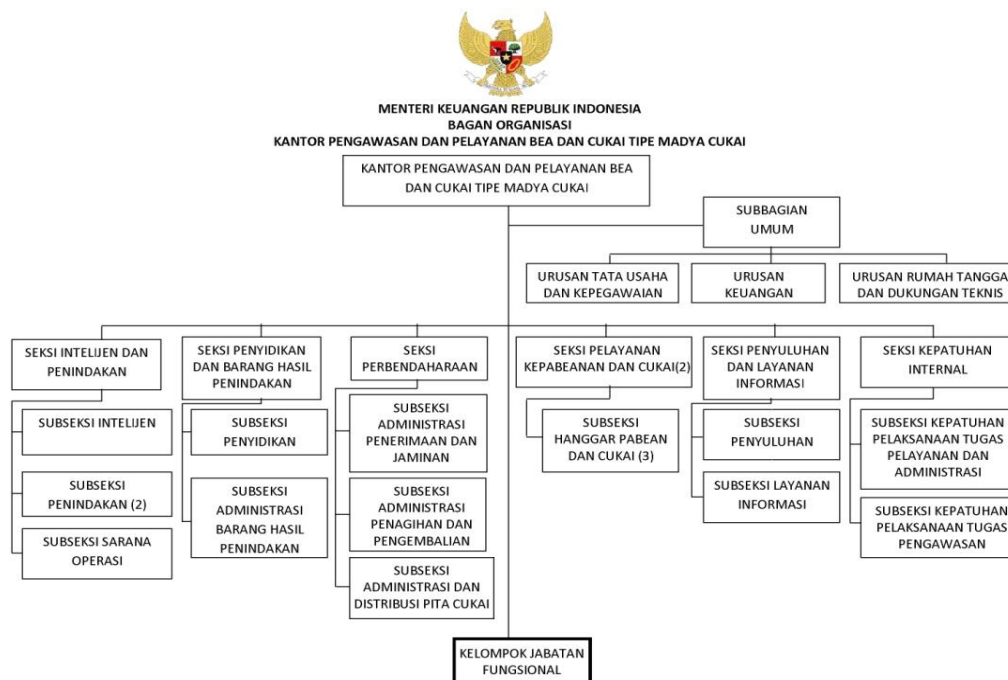
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan dalam ruang lingkup bidang kepabeanan dan cukai. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.01/2009 pada tanggal 8 April 2009 tentang “Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang” yang menerangkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
- 2) Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
- 3) Pelaksanaan pengolahan data, penyajian data, serta laporan kepabeanan dan cukai.
- 4) Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di bidang kepabeanan dan cukai.
- 5) Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- 6) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, saran komunikasi, dan senjata api.
- 7) Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

- 8) Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- 9) Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

(www.beacukaimalang.com, 2017)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang memiliki struktur organisasi guna mengelola struktur kinerja agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang dipimpin oleh kepala kantor dan terdiri dari sub bagian umum serta terdiri enam seksi lainnya. Enam seksi tersebut antara lain Seksi Intelijen dan Penindakan, Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, Seksi Perbendaharaan, Seksi Kepabeanan dan Cukai, Seksi Kepatuhan Internal serta Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Masing-masing seksi tersebut terdiri dari beberapa sub seksi yang akan saling membantu satu sama lain. Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”. Untuk memperjelas pemaparan diatas, dapat terlihat pada gambar 5 (lima) pada halaman 82 yang meliputi struktur organisasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang sebagai berikut :



Gambar 5. Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

Sumber : www.beacukaimalang.com, 2017

Setiap masing-masing seksi memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hal tersebut akan diperjelas di bawah ini sebagai berikut :

(1) Subbagian Umum

Subbagian Umum memiliki beberapa tugas yaitu meliputi urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga kantor pengawasan dan pelayanan, penyusunan laporan kerja dan laporan akuntabilitas, pengolahan dan penyajian data kepabeanan dan cukai, pertukaran data elektronik, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pengoperasian komputer dan saran penunjang, serta pengelolaan dan penyimpanan data dan file. Subbagian Umum juga memiliki

beberapa fungsi yaitu meliputi pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, rumah tangga dan perlengkapan, serta pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan penyusunan rencana kerja serta laporan akuntabilitas. Subbagian Umum memiliki beberapa bagian-bagian yaitu meliputi :

- (i) Urusan Tata Usaha dan Kepagawaian, yang memiliki tugas meliputi penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas serta urusan tata usaha dan kepegawaian KPPBC.
- (ii) Urusan Keuangan, yang memiliki tugas meliputi keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai KPPBC.
- (iii) Urusan Rumah Tangga dan Dukungan Teknis, yang memiliki tugas meliputi rumah tangga dan perlengkapan, pengoperasian komputer dan sarana penunjang KPPBC.

(2) Seksi Intelijen dan Penindakan

Seksi Intelijen dan Penindakan memiliki beberapa tugas yaitu meliputi intelijen, patroli dan operasi pencegahan sekaligus penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di ruang lingkup bidang kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi. Seksi Intelijen dan Penindakan juga memiliki beberapa fungsi yaitu meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pemeriksaan sarana pengangkutan, pengawasan pembongkaran barang. Seksi Intelijen dan Penindakan memiliki beberapa subseksi yaitu meliputi :

- (i) Subseksi Intelijen, yang memiliki tugas meliputi analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran, serta penimbunan barang di bidang kepabeanan dan cukai.
- (ii) Subseksi Penindakan, yang memiliki tugas meliputi patroli dan operasi pencegahan serta penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (iii) Subseksi Sarana Operasi, yang memiliki tugas meliputi sarana komunikasi dan senjata api kantor pengawasan dan pelayanan, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi di bidang kepabeanan dan cukai.

(3) Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan memiliki beberapa tugas yaitu meliputi penyidikan atas tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan barang hasil penindakan dan barang bukti. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan juga memiliki beberapa fungsi yaitu meliputi pemantauan atas tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penatausahaan dan pengelolaan barang hasil penindakan dan barang bukti. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan memiliki beberapa subseksi yaitu meliputi :

- (i) Subseksi Penyidikan, yang memiliki tugas meliputi penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor.

- (ii) Subseksi Administrasi Barang Hasil Penindakan, yang memiliki tugas meliputi penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

(4) Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan memiliki beberapa tugas yaitu meliputi pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya. Seksi Perbendaharaan juga memiliki beberapa fungsi yaitu meliputi penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan, permintaan dan pengembalian pita cukai, serta pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Seksi Perbendaharaan memiliki beberapa subseksi yaitu meliputi :

- (i) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan, yang memiliki tugas meliputi pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, serta penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya.
- (ii) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian, yang memiliki tugas meliputi penagihan kekeurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

- (iii) Subseksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai, yang memiliki tugas meliputi penatausahaan, penerimaan, penyimpanan, serta pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai di bidang kepabeanan dan cukai.

(5) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai memiliki beberapa tugas yaitu meliputi penerimaan, penelitian kelengkapan, pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai juga memiliki beberapa fungsi yaitu meliputi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai, penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor sekaligus penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, serta penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkutan dan jadwal kedatangan sarana pengangkut di bidang kepabeanan dan cukai.

(6) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai memiliki beberapa tugas yaitu meliputi bimbingan kepatuhan, konsultasi, serta layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai juga memiliki beberapa fungsi yaitu meliputi konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai, bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai, serta

pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi memiliki beberapa subseksi yaitu meliputi :

- (i) Subseksi Penyuluhan, yang memiliki tugas meliputi penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (ii) Subseksi Layanan Informasi, yang memiliki tugas meliputi pelayanan informasi, bimbingan, serta konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

(7) Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal memiliki beberapa tugas yaitu meliputi pemantuan pengendalian intern, pengawasan pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Seksi Kepatuhan Internal juga memiliki beberapa fungsi yaitu meliputi pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi, pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Kepatuhan Internal memiliki beberapa subseksi yaitu meliputi :

- (i) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi, yang memiliki tugas meliputi pelaporan dan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, pengawasan pelaksanaan tugas, serta pengendalian intern di bidang kepabeanan dan cukai.

- (ii) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan, yang memiliki tugas meliputi pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, serta pengelolaan kinerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di bidang kepabeanan dan cukai.

(www.beacukaimalang.com, 2017)

B. Penyajian Data

1. Praktik *Black Market* di Kota Malang

Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri kedalam negeri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan mengimpor barang adalah salah satu kegiatan yang menambah penerimaan negara dibawah kewenangan yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Barang yang diimpor dan masuk kedalam Indonesia sangat bermacam-macam dan menarik kepada importir untuk melakukan kegiatan impor secara *ilegal* untuk menghindari pengenaan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Memasukkan barang impor yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku biasa disebut dengan istilah “*Black Market*”.

Praktik *Black Market* yang terjadi di Kota Malang sudah cukup banyak, oleh karena itu pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang selaku yang berwenang untuk mengawasi semua barang-barang yang masuk maupun barang yang keluar negeri telah melakukan beberapa cara untuk meminimalisir adanya pratik *Black Market*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum mengeluarkan peraturan yang mengatur

dengan tegas tentang sanksi atas pelanggaran impor barang yang tidak sesuai dengan prosedur (ilegal).

Salah satu seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang yang mengawasi kegiatan ekspor dan impor barang yaitu seksi Penyidikan dan Penindakan (P2). Berdasarkan penjelasan oleh informan 1 yaitu kepala Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang yang menyatakan bahwa :

“ada beberapa peraturan yang mengatur impor yaitu, KEP. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003. Kemudian KEP. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008. Sebagian besar orang-orang itu tidak begitu mengetahuinya, padahal sudah kita adakan sosialisasi untuk para importir agar tidak kesusahan tapi hanya beberapa yang berkenan yang lain cuek aja ” (Selasa, 18 Juli 2017 Pukul 10.30 WIB).

Selain pernyataan dari kepala seksi penyidikan dan penindakan, dalam hal pencegahan terhadap barang-barang impor yang tidak sesuai dengan prosedur sebagai petugas bea cukai yaitu mengatakan bahwa *“Jika terdapat atau ditemukan barang maupun benda apapun yang datang tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, akan dilakukan pencegahab barang agar tidak keluar dan atau dapat dilunasi bea masuk dan syarat sesuai dengan prosedur”* (Jum’at, 21 Juli 2017 Pukul 11.30 WIB).

Jadi dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengimporan barang harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Seluruh kegiatan impor yang tidak sesuai dengan prosedur termasuk dalam Praktik *Black Market* karena barang-barang yang masuk tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Petugas dari bagian penyidikan dan Penindakan (P2) melakukan pemeriksaan barang impor yang dianggap mencurigakan. Berikut dari informan 2 bahwa:

“Kalau dilihat memang barang tersebut tidak sesuai dengan yang dilampirkan, Petugas akan melakukan penindakan berupa penegahan barang untuk tidak keluar dan akan dilakukan pemeriksaan barang apabila dirasa bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan invoice yang ada dan kemudian petugas mengambil barang tersebut di ruangan berbeda dan jika memang barang tersebut ada yang mengambil di Kantor Pos Lalu Bea Malang, petugas akan memberikan informasi mengenai barang tersebut tidak sesuai dengan prosedur impor dan petugas akan memberikan sanksi berupa, pembayaran denda atau penegahan atas barang impor tersebut. Apabila importir membayar denda yang telah ditetapkan oleh petugas, barang akan diserahkan kepada importir, akan tetapi jika barang tidak dilunasi sesuai dengan peraturan maka akan ditegah dan menjadi barang sita oleh pegawai bea cukai dan apabila importir tetap tidak mengambil barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, barang tersebut akan dilakukan lelang”. (Selasa, 25 Juli 2017 Pukul 09.30 WIB)

Barang-barang yang telah dilakukan penegahan oleh pegawai bea cukai akan dipisahkan kedalam ruangan sendiri dan akan didata dengan keterangan barang yang tidak diambil/ tidak dilunasi bea masuk dan pajak lainnya. Ada beberapa kategori barang yang akan diimpor yaitu batasan barang kiriman dari luar negeri, barang yang memerlukan ijin dari instansi terkait dan kiriman barang

yang dilarang. Yang dimaksud dalam kategori batasan barang kiriman dari luar negeri yaitu berupa rokok (maksimal 40 batang), cerutu (10 batang), hasil tembakau lainnya (maksimal 40 gram) dan minuman beralkohol (maksimal 350 ml). Barang yang memerlukan ijin instansi terkait yaitu handphone atau perangkat telekomunikasi sejenisnya, benih/biji/tumbuhan/hewan dan sejenisnya dan kemudian obat-obatan/ kosmetik dan sejenisnya. Dan yang selanjutnya kiriman barang yang dilarang yaitu seperti Narkoba dan psikotropika, senjata api (asli maupun mainan tertentu) dan barang pornografi.

Seperti yang telah dijelaskan barang-barang yang dikategorikan, yang terjadi dilapangan beberapa barang yang telah dicantumkan tersebut masih sering ditemukan seperti yang telah informan 2 menjelaskan bahwa :

“wah kalau barang-barang seperti itu sudah jelas dan bisa dipastikan banyak yang masuk di kantor pos lalu bea malang ini, salah satunya yang paling sering ditemukan adalah handphone yang lagi digandrungi anak-anak muda sekarang iphone salah satunya. Memang benar si importir telah menuliskan diinvoice dan dokumennya bahwa terdapat handphone iphone tapi disitu hanya ditulis sejumlah 1 pcs saja akan tetapi yang kita temukan dilapangan malah sejumlah 7 pcs. Ya begitulah akal importir sekarang makin pinter tapi untungnya pegawai disini juga tidak mudah percaya begitu saja. Kadang juga sering ada beberapa importir yang protes karena barang dibuka dan digeledah namun ya bagaimana lagi, sudah prosedurnya begitu. Jika tidak sesuai dengan dokumen yang dai lampirkan, tugas kita ya memastikan isinya. Kalau ditanya seberapa sering, ya lumayan sering ya kita temukan beberapa barang tapi ya kadang itu cuman barang-barang seperti sepatu dan baju-baju yang bermerk gitu” (Rabu, 26 Juli 2017 Pukul 10.45 WIB).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan 2 bahwa bahayanya cara-cara yang digunakan oleh importir untuk mengelabui petugas bea cukai agar tidak dikenakan biaya yang besar.

Praktik *Black Market* ini sangat merugikan bagi negara, karena barang-barang yang seharusnya membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Impor adalah salah satu penerimaan yang besar untuk negara, dilihat dari pernyataan dari informan 2 bahwa terdapat handphone mewah yang seharusnya di dokumen dilampirkan 7 buah handphone akan tetapi hanya dilampirkan 1 buah handphone. Informan 2 mengatakan *“ya kalau dilihat dan dihitung kasarannya aja iphone 7 itu harga baru sudah melebihi 10 juta lebih, nah 6 handphone yang lain jika tidak dilaporkan kan sudah lumayan nominalnya”* (Rabu, 26 Juli 2017 Pukul 12.00).

2. Faktor Penghambat Impor Barang dan Dampak *Black Market* Terhadap Pemerintah dan Masyarakat

Dalam pelaksanaan impor barang ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya proses impor yaitu salah satunya adanya praktik *Black Market*. Impor barang yang tidak sesuai dengan prosedur dan tidak membayar sesuai yang telah ditetapkan merupakan kerugian yang sangat besar bagi negara. Oleh karena itu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang melakukan beberapa cara yaitu dengan teliti memeriksa barang yang masuk dan menyesuaikan dengan dokumen yang telah dilampirkan. Ada beberapa faktor penghambat yang diutarakan oleh informan 3 bahwa :

“awal melakukan praktik black market karena iseng aja mbak, sering melihat teman melakukan itu dapetin sepatu kemudian baju dan lama-lama saya juga berfikir enak juga dapet barang dengan mudah dan murah juga. Pertama memang minta diajarin teman karena ini kan termasuk kejahatan cyber crime yang berurusan langsung dengan pihak orang luar negeri dan ini juga menggunakan system carding yaitu memakai kartu kredit orang

luar. Kalau dijelasin semua susah karena ini juga harus mencari nomer kartu kredit orang luar negeri, ya istilahnya kita membobol gitu, oh iya untuk dapet nomor itu sekarang juga banyak anak yang jual online nomor kartu kredit yang siap untuk dibobol” (Jum’at 21 Juli 2017 Pukul 18.00 WIB).

Menurut kenyataan yang terjadi dilapangan sesuai dengan peneliti yang ketahui bahwa prosedur yang resmi untuk melakukan impor sesuai yang dilakukan oleh instansi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang terjadi belum efektif, seperti yang telah disampaikan oleh informan 1 selaku kasi bagian Penyidikan dan Penindakan (P2) yakni:

“memang benar saya juga mengakui untuk efektifitas prosedur impor yang terjadi disini belum 100% efektif. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkannya masalah tersebut, seperti yang ada disini ya misalnya keterbatasan sumber daya manusianya (SDM), kalau seperti petugas yang sudah berumur ya susah untuk lebih mengetahui tentang perkembangan teknologi sekarang. Apalagi sistem pergantian posisi atau selalu adanya rolling disetiap 3 bulan di kantor ini juga menyebabkan terhambatnya perkembangan. Ya kami juga ada petugas khusus yang mengurus masalah teknologi, tapi belum 100% kita bisa menangani canggihnya orang-orang jaman sekarang yang menguasai teknologi. Kita sebagai petugas Cuma bisa tekankan disaat pengambilan barang, apakah sudah sesuai dengan berkas/invoice yang disampaikan importir. Kalau dirasa sudah sesuai ya kita lepaskan, namun kalau dirasa ada yang mengganjal itu kita tahan dan kita pastikan (membuka barang) kita periksa dan menyesuaikan apakah sesuai dengan invoicennya” (Selasa 11 Juli 2017 Pukul 11.45 WIB).

Pernyataan yang diungkapkan oleh informan 3 menjelaskan bahwa faktor penghambat dari kegiatan impor barang salah satunya dikarenakan adanya praktik ilegal yang dilakukan oleh seseorang, tindakan tersebut juga menjadi perhatian penting oleh para petugas bea dan cukai. Akan tetapi susah untuk melacak mereka mendatangkan barang tersebut dengan cara *cyber crime*. Seperti yang diungkapkan oleh informan 3 yaitu :

“untuk alur masuknya barang-barang tersebut pertama order via online di website took menggunakan kartu kredit orang lain (lebih tepatnya orang luar negeri), kemudian dikirim ke forwarding (semacam jasa penyewaan gudang) dan kemudian setelah barang datang (di gudang) saya dikirim email dan bias request untuk minta foto dengan harga \$10/foto. Sesudah semua oke, kemudian oleh forwarder dikirim ke Indonesia secara resmi. Resmi dalam arti kita memang mencantumkan nama barang akan tetapi tidak mencantumkan semuanya hanya beberapa barang saja. Untuk memasarkan barang-barang tersebut kalau udah lolos bea cukai, biasanya dijual dengan harga murah atau harga miring dan biasanya juga sudah ada penadahnya sendiri dan pelanggan yang biasa beli barang di aku. Untuk barang yang dijual biasanya paling banyak sepatu nike, adidas, dan brand-brand yang lagi hits” (Jum’at 21 Juli 2017 Pukul 20.10 WIB).

Dan Informan 3 juga mengatakan *“saya sudah melakukan Praktik Black Market ini mungkin udah masuk tahun ke 6, rata-rata semua yang bergerak dalam bisnis ini karena hanya coba-coba dan terus ketagihan”* (Sabtu 22 Juli 2017 Pukul 15.00 WIB).

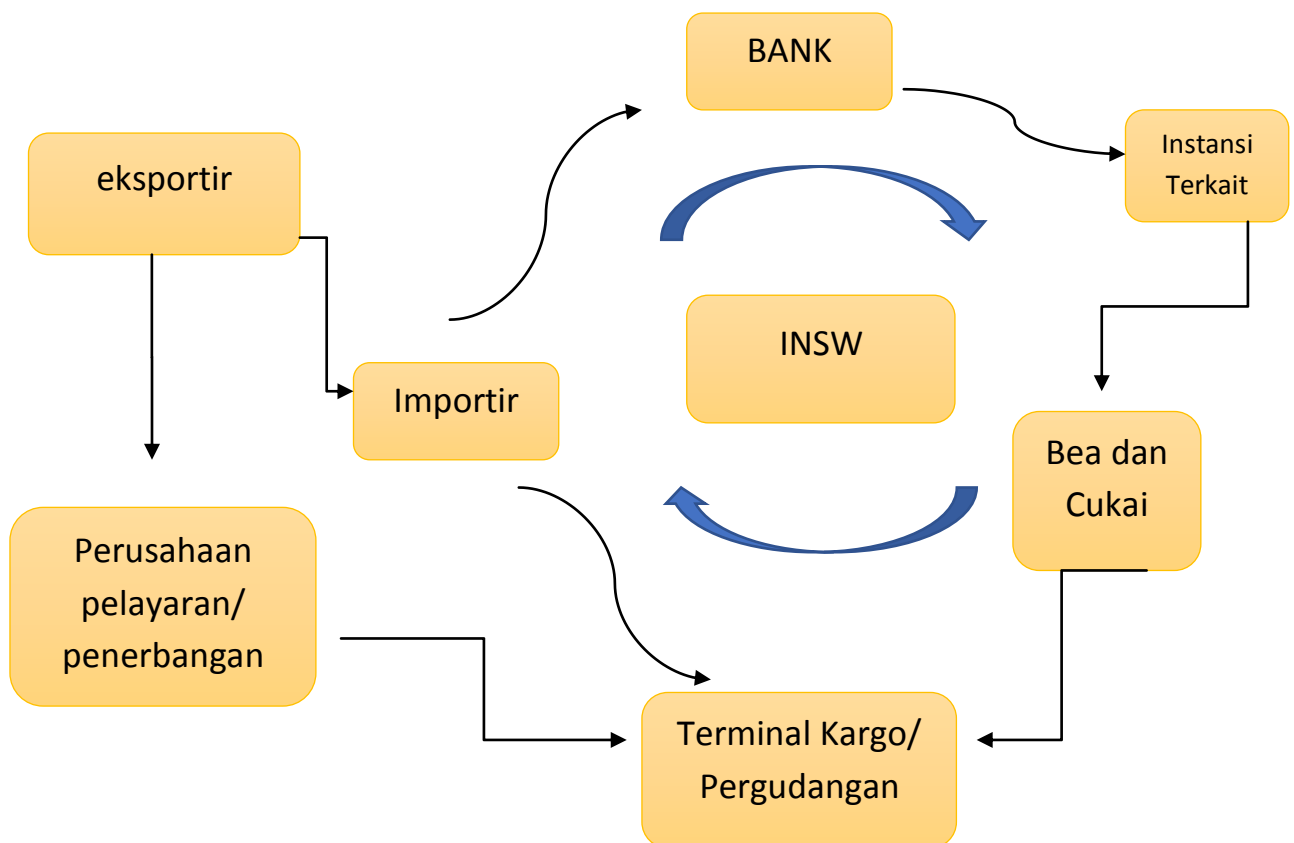
Dampak yang terjadi dari adanya Praktik *Black Market* tentunya bagi pemerintah sangat merugikan, karena otomatis pendapatan negara yang seharusnya dibayarkan menjadi tidak ada penerimaan tersebut dibenarkan oleh informan 2 dan mengatakan *“Rugi sih sangat pasti, karena pendapatan yang seharusnya diterima jadi tidak ada”* (Selasa, 25 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB).

C. Pembahasan

1. Gambaran Umum Prosedur Impor Barang dan Praktik *Black Market* Di Kota Malang

a. Prosedur Umum Impor Barang

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2002. Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia adalah sebagai berikut :



Gambar 5 Prosedur Impor Barang Secara Resmi

Sumber: Diolah Peneliti, 2017

Penjelasan Gambar :

- a) Importir mencari *supplier* barang sesuai dengan yang akan diimpor.
- b) Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor kemudian antar Bank ke Bank Luar Negeri untuk menghubungi supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian L/C yang disepakati kedua belah pihak.
- c) Barang-barang dari supplier siap untuk dikirim kepelabuhan pemuatan untuk diajukan.
- d) Supplier mengirim faks ke Importir dokumen B/L, Inv, *Packing List* dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Sertifikat karantina, Form E, Form D, dsb)
- e) Original dokumen dikirim via Bank/ original kedua ke importir.
- f) Pembuatan/pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai modul PIB dan EDI *System* sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
- g) Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea Masuk, PPh dan Pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan didalam PIB.

- h) Importir membayar ke Bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- i) Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara *online* melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
- j) Data PIN terlebih dahulu akan diproses diportal Indonesia Nasional *Single Window* (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (*Analizing Point*) terkait Lartas.
- k) Jika ada kesalahan maka PIB akan *direject* dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB.
- l) Setelah proses diportal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
- m) Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan *Analizing Point* di SKP.
- n) Jika data benar akan dibuat penjaluran.
- o) Jika PIB terkena jalur hijau, maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- p) Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

- q) Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB.
- r) Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB.

Beberapa hal yang membuat dokumen mendapat Jalur Merah antara lain :

- 1) Impor baru
- 2) Profil Importir *High Risk*
- 3) Barang Impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
- 4) Barang Impor sementara
- 5) Barang Operasioanal Perminyakan (BOP) golongan II
- 6) Ada informasi intelejen/NHI
- 7) Terkena sistem acak/random
- 8) Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisikotinggi dan/atau berada dari negara yang berisiko tinggi.

Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peluang terjadinya praktik *Black Market* dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi Petugas Bea Cukai dan Pelaku *Black Market*. Yang pertama dari sisi petugas bea dan cukai, lolosnya barang *black market* di Kota Malang dikarenakan sering terjadinya rolling petugas dibagian Kantor Pos Lalu Bea Malang menyebabkan kurang produktifnya petugas bea cukai dan menjadi faktor terjadinya kecurangan beberapa oknum dan solusinya agar dilakukan rolling paling tidak 5 tahun sekali agar dapat diketahui kinerja para petugas dan meminimalisir terjadinya

oknum yang nakal. Faktor lain yaitu tidak adanya sanksi yang mengatur atas terjadinya kelalaian kerja pada petugas bea cukai, solusinya agar ditetapkan sanksi yang tegas karena meloloskan barang impor secara illegal sangat merugikan pendapatan pada Negara.

Faktor lain dilihat dari sisi pelaku *Black Market* yaitu melakukan pemalsuan invoice pembelian barang illegal yang digunakan untuk mengelabui petugas bea cukai agar tidak dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Solusinya yaitu seharusnya harus ditetapkan standarisasi atas invoice dari masing-masing barang, agar dapat dengan mudah melihat bahwa invoice tersebut asli bukan rekayasa dari pelaku *Black Market*. Kemudian dapat dilihat, pelaku *Black Market* yang tertangkap oleh pihak bea cukai hanya dikenakan sanksi peneguran dan hanya menegah barang tersebut dan jika telah dilakukan pembayaran yang sesuai barang dapat dikeluarkan. Solusi dari penindakan tersebut seharusnya diberlakukannya sanksi yang membuat pelaku jera, agar pelaku *Black Market* tidak melakukan atau mengulangi hal tersebut.

2. Dampak *Black Market* Terhadap Pemerintah dan Masyarakat Industri

a. Dampak *Black Market* Terhadap Pemerintah

Pada awal terjadinya Praktik *Black Market* bersifat tertutup, hanya beberapa masyarakat yang mengetahui keberadaan pasar tersebut, namun perlahan praktik *Black Market* menjadi perhatian di masyarakat. Praktik *Black Market* ternyata sangat merugikan Negara Indonesia, sebab barang-barang

tersebut masuk Indonesia tidak terkena bea masuk dan pajak lainnya. Pajak adalah salah satu pemasukkan Negara yang paling tertinggi di Indonesia, dengan adanya Praktik *Black Market* jelas pendapatan negara akan menurun. Transaksi jual beli *Black Market* ini juga akan mempengaruhi dan mengganggu keseimbangan pasar.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik *Black Market* Seperti yang telah diungkapkan oleh informan-informan, seperti yang telah disampaikan oleh pihak Bea Cukai bahwa praktik *Black Market* sangat mempengaruhi pendapatan negara di bidang impor. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik *Black Market* terutama di Kota Malang sangat mempengaruhi pendapatan negara yang menjadi berkurang. Berkurangnya pendapatan negara yang dihasilkan dapat juga mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan pemerintah pada daerah Kota Malang.

Praktik *Black Market* di Kota Malang dapat dilihat bahwa para pelaku dengan mudahnya menghasilkan semua barang yang diinginkan kemudian dapat mereka jual bebas. Kemudian sanksi yang diberikan untuk importir hanya ditegur dan menyelesaikan prosedur berupa sanksi administrasi.

b. Dampak *Black Market* Terhadap Masyarakat

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumtif yang tinggi terhadap barang-barang terutama barang impor seperti gadget, baju, tas dan lain-lain. Akibat permintaan pasar yang begitu besar, produsen (pelaku *black market*) menjadi memanfaatkan keadaan seperti meredarkan barang-barang *black market* dan dijual belikan luas di masyarakat.

Permintaan produk-produk branded yang sedang diminati para konsumen didatangkan oleh produsen dengan cara ilegal kemudian dipasarkan secara online dengan harga menjadi sangat murah dari harga yang sebenarnya. Barang ilegal tersebut dipasarkan oleh pedagang khusus yang sudah lama memasarkan kepada konsumen-konsumen yang telah mengetahui adanya perdagangan barang-barang ilegal tersebut.

Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat yaitu berdampak kepada masyarakat industri. Masyarakat-masyarakat industry yang berdagang barang-barang secara legal atau resmi merasakan dampak dari adanya Praktik *Black Market* di Kota Malang. Sebab masyarakat indutri tersebut sudah melakukan perdagangan barang dengan mematuhi dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, dengan mengimpor barang dagangan secara resmi dengan melampirkan dokumen-dokumen resmi kepada pihak bea dan cukai.

Masyarakat industry menjadi merasa dirugikan, dikarenakan adanya praktik blackmarket membuat keseimbangan harga pasar atas produk yang dijual menjadi terganggu. Tidak hanya keseimbangan harga pasar yang terganggu melainkan keadaan ekonomi di Kota Malang menjadi menurun, sebab dimana pelaku black market menjual suatu barang impor ilegal dengan harga yang jauh dibandingkan dengan harga pasar yang ditawarkan oleh masyarakat industry barang resmi. Dengan demikian dapat disimpulkan konsumen akan lebih memilih membeli barang ilegal dengan kualitas barang yang sama yang dijual oleh masyarakat resmi. Keadaan tersebut sangatlah

berdampak negative dan dapat menjadikan suatu permasalahan ekonomi di masyarakat khususnya pada masyarakat industry di Kota Malang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Impor Barang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan memiliki prosedur yang telah ditetapkan sesuai undang-undang yang berlaku. Peran dari pegawai bea dan cukai dalam impor barang yaitu pegawai bea dan cukai mengawasi dan memeriksa setiap barang yang masuk dan yang keluar Indonesia yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Faktor adanya praktik *black market* di Indonesia terutama yang ada di Kota Malang diantaranya karena kurangnya kontrol pengawasan yang dilakukan pihak bea cukai dikarenakan banyaknya barang yang masuk dan tidak dapat diperiksa secara mendetail, sehingga beberapa barang yang tidak sesuai dengan *invoice* yang dilaporkan dapat keluar (ilegal). Oleh sebab itu, praktik *black market* dapat merugikan negara karena pendapatan negara yang didapatkan dari impor barang melalui bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan ketentuan pajak lainnya atas barang impor itu tidak dibayarkan, sehingga pendapatan negara menjadi tidak bertambah.
2. Dampak dari adanya Praktik *Black Market* di Kota Malang yaitu bagi masyarakat akan berdampak menurunnya kedisiplinan dari masing-masing individu karena dengan adanya barang impor yang bisa didapatkan dengan

harga murah mengakibatkannya masyarakat menjadi tidak taat pada peraturan yang ada dan akan berdampak pula bagi penerimaan negara. Faktor lain yang menyebabkan adanya praktik *black market* ini juga didukung dari tingginya ilmu teknologi yang dimiliki oleh pelaku untuk dapat mengelabui para pegawai bea dan cukai.

B. Saran

Ada beberapa saran dari peneliti yang mungkin dapat dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sebagai pelaksana pengawasan impor barang:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang harus memperbaiki sistem yang dimiliki untuk dapat lebih rinci mendeteksi barang-barang yang datang di Kantor Pos Lalu Bea Malang agar lebih mudah memantau barang apasaja yang datang dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan *invoice* yang telah dilaporkan oleh Importir.
2. Sebagian besar yang melakukan kegiatan praktik *black market* dilakukan oleh orang-orang yang lebih memahami ilmu teknologi dan mereka telah mempunyai pendah khusus untuk menjualkan barang-barang ilegal, oleh sebab itu yang harus dilakukan oleh KPPBC TMC Malang harus mempunyai tenaga ahli khusus yang mengerti ilmu teknologi dan membuat portal khusus agar tidak bisa diakses dan pegawai bea cukai harus memberlakukan peraturan khusus bagi importir yang tertangkap basah dengan tidak melaporkan barang yang sebenarnya diimpor.

Peraturan mengenai sanksi untuk importir yang melakukan praktik *black market* masih rendah, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seharusnya lebih memperhatikan peraturan sanksi bagi pelaku *black market*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian. Sutedi. 2014. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anggoro, M. Linggar. 2008. *Teori Dan Profesi Kehumasan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto. Sholihin. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azwar. Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (1994). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- _____. 2014. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Fuad, Anis dan Kandung Septo Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah. 1985. *Delik Penyelundupan*. Akademi Presindo. Jakarta: Erlangga.
- Jafar, Mohamad. 2015. “*Kepabeanaan Ekspor-Import*”. Terbitan Pertama. Jakarta Selatan: PT. Pro Insani Cendekia.
- Laden, Marpaung. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. S, Amir. 1980. *Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Bharatara Karya Aksara.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peter, J. Paul dan Jerry C Olson. 2000. *Custumer Behavior. Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran Jilid 1*. Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soufnir, Chibro. 1985. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Akademi Presindo. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sweeney, J. C, Soutar, G.N & Johnson, L. W. 1998. “*Customer Perceived Value: Development of a multiple item scale, American Marketing Assosiation Science*.”
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Impor Barang Yang Di Bawa Oleh Penumpang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009.
- Waluyo. 2011. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Skripsi

- Swariananta, Vivi. 2014. *Mekanisme Kerja Petugas Bea dan Cukai Bandara Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan*

Narkotika-Psikotropika. Skripsi Program Studi Hukum. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.

Dewi, Meita Ayu Kumala. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Atas Peraturan Kiriman Pos Luar Negeri dan Kesadaran Pengguna Jasa Terhadap Kepatuhan*. Skripsi Program Studi Perpajakan. Malang. Program Sarjana Universitas Brawijaya.

Sari, Tyas Intan Permata. 2016. *Pengaruh Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Penerimaan KPPBC TMC Malang*. Skripsi Program Studi Perpajakan. Malang. Program Sarjana Universitas Brawijaya.

Jurnal

Febriyanti Tri, Friska. 2012. “Implementasi Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Beban Guna Perbaikan dan/atas Pemeliharaan Pesawat Terbang Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta”. Universitas Indonesia, Jurnal.

Nugrahani, P.N.A. 2003. “Perbedaan Kecenderungan Gaya Hipun Hedonisme Pada Remaja Di Tinjau dari Lokasi Tempat Tinggal”.

Artikel

Lana, Winayanti. 2011. “Menuju Kota Bebas Kumuh, Edisi 3, halaman 8

Internet

Dampak Impor Pakaian Bekas menurut Menteri Perdagangan, diakses 18 Maret 2017 dari <https://www.detik.com/>

Lazuardi, Glery. (2014). Sespimti Gelar Seminar Nasional Wujudkan Pimpinan Polri Excellent, diakses pada 23 April 2017 dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/11/sepimti-gelarseminar-nasional-wujudkan-pimpinan-polri-excellent> (online).

Kejahatan Dunia Maya menurut Rassmussen College, diakses pada 8 Maret 2017 dari <https://www.destidesternity.blogspot.co.id/>

Keputusan Presiden. No.73 Tahun 1967. Tentang “Tindak Pidana Penyelundupan” diakses pada 17 Maret 2017 dari <http://www.ortax.org/>

Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk, diakses 27 Maret 2017 dari <https://www.telukbayur.beacukai.go.id/>

Peraturan Menteri Keuangan. No. 188/PMK.04/2010. Tentang “Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang” diakses pada 17 Maret 2017 dari <http://www.ortax.org/>

Peraturan Menteri Keuangan. No. 210/PMK.03/2008. Tentang “Penunjukkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22” diakses pada 12 Maret 2017 dari <http://www.ortax.org/>

Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 1 Ayat (2) No. 53/PMK.04/2008. Tentang “Penyelesaian Terhadap Barang Yang dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Neaga, Barang yang Menjadi Milik Negara dan Barang yang Telah Dinyatakan Tidak Dikuasai” diakses pada 12 Maret 2017 dari <http://www.ortax.org/>

- Pasal 1 Ayat (3) No. 53/PMK.04/2008. Tentang “Penyelesaian Terhadap Barang Yang dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Neaga, Barang yang Menjadi Milik Negara dan Barang yang Telah Dinyatakan Tidak Dikuasai” diakses pada 12 Maret 2017 dari <http://www.ortax.org/>

Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 1 Ayat (1) No. 161/PMK.04/2007. Tentang “Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan” diakses pada 12 Maret 2017 dari <http://www.ortax.org/>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang.



Lampiran 2. Surat Izin Riset

Lampiran 3. Data Bulanan Penerimaan Bea Masuk Periode 2012-2016

N0	Tahun	Bulan	Data Penerimaan Bea Masuk
1	2012	Januari	Rp. 2.161.000
2	2012	Februari	Rp. 19.601.657
3	2012	Maret	Rp. 11.975.865
4	2012	April	Rp. 15.425.000
5	2012	Mei	Rp. 20.396.643
6	2012	Juni	Rp. 25.492.669
7	2012	Juli	Rp. 26.866.819
8	2012	Agustus	Rp. 27.249.640
9	2012	September	Rp. 25.230.021
10	2012	Oktober	Rp. 16.176.170
11	2012	November	Rp. 25.618.375
12	2012	Desember	Rp. 14.795.000
13	2013	Januari	Rp.15.791.000
14	2013	Februari	Rp. 29.718.288
15	2013	Maret	Rp.10.858.294
16	2013	April	Rp. 20.726.000
17	2013	Mei	Rp. 20.829.405
18	2013	Juni	Rp. 30.277.631
19	2013	Juli	Rp. 28.231.730
20	2013	Agustus	Rp. 22.804.000
21	2013	September	Rp. 30.439.833
22	2013	Oktober	Rp. 11.216.366

Lanjutan lampiran 2

No	Tahun	Bulan	Data Penerimaan Bea Masuk
23	2013	November	Rp. 33.510.000
24	2013	Desember	Rp. 23.267.260
25	2014	Januari	Rp. 18.060.510
26	2014	Februari	Rp. 33.510.000
27	2014	Maret	Rp. 15.851.000
28	2014	April	Rp. 34.064.229
29	2014	Mei	Rp. 36.673.016
30	2014	Juni	Rp. 51.292.370
31	2014	Juli	Rp. 28.002.000
32	2014	Agustus	Rp. 9.057.868
33	2014	September	Rp. 16.856.047
34	2014	Oktober	Rp. 19.917.517
35	2014	November	Rp. 45.412.819
36	2014	Desember	Rp. 27.566.072
37	2015	Januari	Rp. 43.205.296
38	2015	Februari	Rp. 58.556.880
39	2015	Maret	Rp. 28.686.437
40	2015	April	Rp. 41.729.237
41	2015	Mei	Rp. 50.428.019
42	2015	Juni	Rp. 70.540.039
43	2015	Juli	Rp. 73.822.295
44	2015	Agustus	Rp. 54.102.688

Lanjutan Lampiran 2

No	Tahun	Bulan	Data Penerimaan Bea Masuk
45	2015	September	Rp. 29.718.288
46	2015	Oktober	Rp. 42.924.676
47	2015	November	Rp. 43.300.726
48	2015	Desember	Rp. 57.621.475
49	2016	Januari	Rp. 18.681.379
50	2016	Februari	Rp. 33.845.257
51	2016	Maret	Rp. 47.479.019
52	2016	April	Rp. 40.325.499
53	2016	Mei	Rp. 35.902.000
54	2016	Juni	Rp. 39.638.000
55	2016	Juli	Rp. 21.120.000
56	2016	Agustus	Rp. 37.334.173
57	2016	September	Rp. 15.355.607
58	2016	Oktober	Rp. 32.975.198
59	2016	November	Rp. 18.065.000
60	2016	Desember	Rp. 27.185.000

Lampiran 3. Data Bulanan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Periode 2012-2016

N0	Tahun	Bulan	Data Penerimaan Bea Masuk
1	2012	Januari	Rp. 2.161.000
2	2012	Februari	Rp. 19.601.657
3	2012	Maret	Rp. 11.975.865
4	2012	April	Rp. 15.425.000
5	2012	Mei	Rp. 20.396.643
6	2012	Juni	Rp. 25.492.669
7	2012	Juli	Rp. 26.866.819
8	2012	Agustus	Rp. 27.249.640
9	2012	September	Rp. 25.230.021
10	2012	Oktober	Rp. 16.176.170
11	2012	November	Rp. 25.618.375
12	2012	Desember	Rp. 14.795.000
13	2013	Januari	Rp.15.791.000
14	2013	Februari	Rp. 29.718.288
15	2013	Maret	Rp.10.858.294
16	2013	April	Rp. 20.726.000
17	2013	Mei	Rp. 20.829.405
18	2013	Juni	Rp. 30.277.631
19	2013	Juli	Rp. 28.231.730
20	2013	Agustus	Rp. 22.804.000
21	2013	September	Rp. 30.439.833
22	2013	Oktober	Rp. 11.216.366

Lanjutan Lampiran 3

No	Tahun	Bulan	Data Penerimaan Bea Masuk
23	2013	November	Rp. 33.510.000
24	2013	Desember	Rp. 23.267.260
25	2014	Januari	Rp. 18.060.510
26	2014	Februari	Rp. 33.510.000
27	2014	Maret	Rp. 15.851.000
28	2014	April	Rp. 34.064.229
29	2014	Mei	Rp. 36.673.016
30	2014	Juni	Rp. 51.292.370
31	2014	Juli	Rp. 28.002.000
32	2014	Agustus	Rp. 9.057.868
33	2014	September	Rp. 16.856.047
34	2014	Oktober	Rp. 19.917.517
35	2014	November	Rp. 45.412.819
36	2014	Desember	Rp. 27.566.072
37	2015	Januari	Rp. 43.205.296
38	2015	Februari	Rp. 58.556.880
39	2015	Maret	Rp. 28.686.437
40	2015	April	Rp. 41.729.237
41	2015	Mei	Rp. 50.428.019
42	2015	Juni	Rp. 70.540.039
43	2015	Juli	Rp. 73.822.295
44	2015	Agustus	Rp. 54.102.688

Lanjutan Lampiran 3

No	Tahun	Bulan	Data Penerimaan Bea Masuk
45	2015	September	Rp. 29.718.288
46	2015	Oktober	Rp. 42.924.676
47	2015	November	Rp. 43.300.726
48	2015	Desember	Rp. 57.621.475
49	2016	Januari	Rp. 18.681.379
50	2016	Februari	Rp. 33.845.257
51	2016	Maret	Rp. 47.479.019
52	2016	April	Rp. 40.325.499
53	2016	Mei	Rp. 35.902.000
54	2016	Juni	Rp. 39.638.000
55	2016	Juli	Rp. 21.120.000
56	2016	Agustus	Rp. 37.334.173
57	2016	September	Rp. 15.355.607
58	2016	Oktober	Rp. 32.975.198
59	2016	November	Rp. 18.065.000
60	2016	Desember	Rp. 27.185.000

Lampiran 4. Data Bulanan Penerimaan KPPBC TMC Malang Periode 2012-2016

N0	Tahun	Bulan	Data Penerimaan KPPBC TMC Malang
1	2012	Januari	Rp. 497.526.639.296
2	2012	Februari	Rp. 765.202.359.538
3	2012	Maret	Rp. 630.560.129.934
4	2012	April	Rp. 674.518.776.907
5	2012	Mei	Rp. 790.627.304.034
6	2012	Juni	Rp. 847.402.120.558
7	2012	Juli	Rp. 903.716.517.959
8	2012	Agustus	Rp. 918.997.480.881
9	2012	September	Rp. 840.457.516.298
10	2012	Oktober	Rp. 712.983.902.685
11	2012	November	Rp. 861.748.705.494
12	2012	Desember	Rp. 642.727.151.374
13	2013	Januari	Rp.695.897.509.793
14	2013	Februari	Rp. 967.548.914.107
15	2013	Maret	Rp.606.897.458.800
16	2013	April	Rp. 795.482.716.935
17	2013	Mei	Rp. 796.847.842.275
18	2013	Juni	Rp. 973.362.782.830
19	2013	Juli	Rp. 943.701.217.093
20	2013	Agustus	Rp. 821.220.255.817
21	2013	September	Rp. 977.293.280.640
22	2013	Oktober	Rp. 611.755.989.139

Lanjutan Lampiran 4

No	Tahun	Bulan	Data Penerimaan Bea Masuk
23	2013	November	Rp. 999.332.605.455
24	2013	Desember	Rp. 824.932.130.825
25	2014	Januari	Rp. 734.242.180.175
26	2014	Februari	Rp. 994.712.733.989
27	2014	Maret	Rp. 697.823.731.349
28	2014	April	Rp. 1.022.755.998.427
29	2014	Mei	Rp. 1.126.460.765.767
30	2014	Juni	Rp. 1.311.266.555.176
31	2014	Juli	Rp. 927.950.419.160
32	2014	Agustus	Rp. 736.243.832.605
33	2014	September	Rp. 803.059.918.413
34	2014	Oktober	Rp. 731.603.481.641
35	2014	November	Rp. 1.008.649.276.680
36	2014	Desember	Rp. 1.299.215.378.245
37	2015	Januari	Rp. 962.286.421.720
38	2015	Februari	Rp. 1.188.318.073.417
39	2015	Maret	Rp. 925.147.956.720
40	2015	April	Rp. 1.279.115.180.935
41	2015	Mei	Rp. 648.703.629.630
42	2015	Juni	Rp. 917.173.900.320
43	2015	Juli	Rp. 1.276.674.294.050
44	2015	Agustus	Rp. 99.370.354.843

Lanjutan Lampiran 4

No	Tahun	Bulan	Data Penerimaan Bea Masuk
45	2015	September	Rp. 585.336.414.960
46	2015	Oktober	Rp. 1.224.238.125.440
47	2015	November	Rp. 555.511.051.620
48	2015	Desember	Rp. 1.486.108.779.600
49	2016	Januari	Rp. 729.590.111.000
50	2016	Februari	Rp. 1.198.257.667.500
51	2016	Maret	Rp. 1.145.350.790.598
52	2016	April	Rp. 1.178.208.893.590
53	2016	Mei	Rp. 739.602.489.280
54	2016	Juni	Rp. 1.408.192.096.175
55	2016	Juli	Rp. 1.110.351.947.650
56	2016	Agustus	Rp. 1.413.031.947.650
57	2016	September	Rp. 1.555.452.107.850
58	2016	Oktober	Rp. 1.229.913.373.245
59	2016	November	Rp. 1.212.799.223.510
60	2016	Desember	Rp. 1.337.947.755.520

Lampiran 5. Formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Lampiran 6. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

1. Apa saja Dasar Hukum yang mengatur tentang Impor?
2. Bagaimana Alur masuknya barang impor dari Luar Negeri ke Dalam Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Apa saja tindakan pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak Bea Cukai untuk mencegah adanya praktik *black market* ini?
4. Bagaimana terjadinya praktik *Black Market* di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Malang?
5. Apa yang dilakukan Bea Cukai terhadap barang-barang *black market*?
6. Seberapa sering pegawai bea cukai menemukan barang-barang impor yang diselundupkan oleh pelaku *Black Market*?
7. Apakah ada hukuman bagi para pelaku *black market* ini?
8. Seberapa besarkah kerugian yang dialami negara setiap tahunnya dengan adanya para pelaku *black market* ini?

Lampiran 7. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama	: Arizka Novandita Hardianti
TTL	: Malang, 5 November 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tinggi Badan	: 150 cm
Alamat	: Jl. Ranakah Blok Q.18 , Tidar – Malang
No. HP	: 082143162767
Status	: Belum Menikah
Email	: arizkanov@yahoo.com